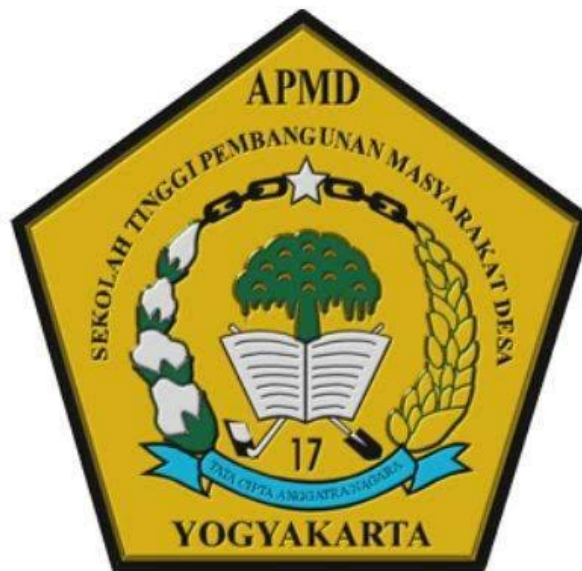


**PEMENANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA TANPA POLITIK UANG
STUDI KASUS KALURAHAN TIRENGGO KABUPATEN BANTUL**

TAHUN 2022

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ARDIAN SUNARMA L.D.

19520023

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2023

**PEMENANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA TANPA POLITIK UANG
STUDI KASUS KALURAHAN TRIRENGGO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan
STPMD “APMD” Yogyakarta**



Disusun Oleh :

ARDIAN SUNARMA L.D.

19520023

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :


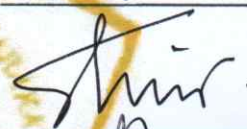

Hari : Jumat

Tanggal : 12 Mei 2023

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si</u> Penguji samping I	
3. <u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardian Sunarma L.D.

Nim : 19520023

Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1) STPMD "APMD" Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Tanpa Politik Uang, Studi Kasus Kalurahan Tlirenggo Kabupaten Bantul Tahun 2022" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri. Seluruh kata atau kalimat yang dikutip maupun dirujuk telah saya cantumkan sumbernya aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bantul, 7 Juni 2023
Membuat pernyataan

Ardian Sunarma L.D.
19520023

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(Hadist Riwayat Ahmad)

“Slow down and let it flow”

(SunSrg_Bird Farm)

“Lila lamun ketaman, kelangan ora getun”

“Ikhlas”

(Sunarma)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil tulisan berupa skripsi ini, penulis persembahkan yang pertama kepada Ibu Risdiyanti binti Sutresna dan Bapak Endi Harya bin Soenarya yang memberikan segalanya untuk kehidupan penulis. Termasuk dalam memfasilitasi, memotivasi dan mendukung penulis dalam menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Restu beserta doa yang dipanjatkannya membuat penulis menerima kemudahan dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Selain itu, beliau telah bekerja tanpa lelah untuk membesarkan penulis sehingga penulis bisa tegak berdiri hingga saat ini.

Kedua, untuk adik penulis yakni Sunarmilang dan Sunarnimas. Semoga tulisan sederhana dari kakaknya ini bisa memotivasi mereka berdua jangan sampai jenjang pendidikan yang dijalani dibawah kakaknya.

Ketiga, untuk keluarga besar kami. Skripsi ini menjadi sebuah langkah awal bagi penulis untuk bangkit dan berusaha memperbaiki keadaan ekonomi. Doa dari seluruh keluarga masih sangat kami harapkan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan kedepan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang dan karunia-Nya sehingga proses penulisan skripsi dengan judul **“Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Tanpa Politik Uang”** dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat dinantikan syafa'atnya kelak di alam akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta, Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si yang telah memberikan izin penelitian sehingga penulis bisa diterima saat terjun di lapangan.
2. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam setiap tahapan skripsi yang dilalui.
3. Mas Surya Prasetya yang selalu memberikan nasihat serta dukungan materi maupun non materi ketika penulis merasa jenuh dan tidak percaya diri dalam segala urusan.
4. Mas Fajar Santosa yang terlibat dalam membantu pembiayaan kuliah sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S1.
5. Lurah Trirenggo, Ibu Ernawati Kusumaningsih, M.Or yang telah membantu penulis dalam mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proses skripsi.
6. Ameylia Vanissa Pungky yang sabar menjawab pertanyaan penulis tentang tatacara penulisan yang benar dan telah membantu menghasilkan ide-ide baru.

7. Rr. Laksita Anggita yang bersedia merepotkan diri sendiri membantu penulis dalam editing beberapa bagian skripsi.
8. Betris Septiani dan Shinta Pawestri yang selalu hadir dikala penulis kesulitan walaupun hanya melalui *whatsApp*.
9. Koordinator KKN, Luh Putu Tutiyuliani, S.IP yang selalu memberikan motivasi yang membangkitkan semangat penulis.
10. Teman-teman penulis : Muhammad Andaru, Farlin, Reza Damarjati, Galuh Kusuma, Anggit Dwi, Anisa Septiana dan Gus Faruq.
11. Teman-teman organisasi : Ansor Banser Bantul Kota, Pagar Nusa Bantul Kota, Majelis Ngaji Konco Ngopi, UKM Islam Apmd, Hmj, Karang Taruna Tirenggo, Pawiyatan Pranatacara Dermojuwang dan Lapak Merpati Pondok Kolam Lele.

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kerangka Konseptual.....	13
1. Demokrasi Desa	14
2. Strategi Pemenangan Pilkades	19
G. Metode Penelitian	25
BAB II.....	30
GAMBARAN UMUM KALURAHAN TRIRENGGO	30
DAN PROFIL CALON LURAH.....	30
A. Sejarah Kalurahan Trirenggo	30
B. Visi dan Misi Kalurahan Trirenggo.....	30
C. Nama Lurah Yang Pernah Menjabat.....	31
D. Pemerintah Kalurahan.....	33
E. Kondisi Geografis Kalurahan Trirenggo	36
F. Komposisi Penduduk Kalurahan	38
G. Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Kalurahan Trirenggo.....	42
H. Profil Calon Lurah Kalurahan Trirenggo Kabupaten Bantul	45
I. Hasil Rekapitulasi.....	52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PEMENANGAN PILKADES TANPA POLITIK UANG KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN 2022	54
A. Pengantar.....	54

B. Dugaan Kemenangan Pilkades Tanpa Politik Uang.....	56
C. Awal mula Ernawati menduduki jabatan politik	57
D. Pemenangan Pilkades Tanpa Politik Uang	61
1. Tawakal dan Istiqomah mengabdikan pada masyarakat.....	62
2. Kedekatan Dengan Masyarakat	64
3. Tidak Terpancing Kampanye Lawan Politik	69
E. Dinamika Politik Lokal Yang Terjadi	73
1. Peran Ulama Dibalik Kemenangan Ernawati Kusumaningsih, M.Or.....	74
2. Ekpos dan Keberpihakan Media	76
3. Saling Tuduh Antar Pendukung	77
BAB IV	79
KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Strategi Pemenangan Pilkades Trirenggo, Bantul.....	25
Gambar 2. 1 Peta Kalurahan Trirenggo.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Nama Informan.....	30
Tabel 2. 1 Daftar Lurah Kalurahan Trirenggo.....	32
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kalurahan Trirenggo Berdasarkan Jenis Kelamin...	39
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Kalurahan Trirenggo Berdasarkan Usia.....	39
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kalurahan Trirenggo Berdasarkan Pekerjaan.....	40
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Kalurahan Trirenggo Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 2. 6 Hasil Rekapitulasi Pilkades Trirenggo.....	54

INTISARI

Hadirnya pemilihan kepala desa secara langsung menjadikan masyarakat turut berpartisipasi dan *handarbeni* dalam berjalannya pemerintahan. Namun, kenyataan tak seindah harapan. Dalam tahapan-tahapan pilkades di Indonesia banyak disertai pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, politik identitas dan lain sebagainya. penulis akan memberikan gambaran tentang strategi yang digunakan oleh calon lurah pemenang di Kalurahan Trirenggo dengan cara *sportif* dalam pilkades. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui alasan lurah terpilih yang tidak tergiur cara asal menang dan mengetahui pola pikir masyarakat dalam menentukan lurah di Trirenggo.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, hasil wawancara dengan narasumber yang relevan menjadi data primer ditambah dengan dokumen-dokumen sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kalurahan Trirenggo, Kabupaten Bantul memiliki lurah yang tidak melakukan praktek politik uang. Dari tulisan ini diharapkan bisa menjadi pemacu semangat untuk generasi penerus agar berpolitik dengan cara yang baik.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa ada tiga cara jitu yang digunakan oleh Ernawati Kusumaningsih, M.Or. *Pertama* adalah tawakal dan istiqomah mengabdikan. Artinya sebagai calon lurah wajib memiliki niat mengabdikan dan tidak perlu menggebu-gebu harus menang, Ernawati menyadari bahwa rejeki manusia sudah ada yang mengatur sesuai takaran. *Kedua*, kedekatan dengan masyarakat. Ernawati memiliki prinsip bahwa pemerintah memiliki kewajiban melayani masyarakat bukan minta untuk dilayani. Oleh karena itu, selama menjadi pelayan masyarakat (lurah antar waktu) Ernawati tidak memiliki sekat dengan masyarakat. *Ketiga*, tidak terpancing kampanye lawan politik. Ernawati memilih diam dan fokus pada visi-misi yang telah disusun ketika oknum lawan menaikkan suhu politik. Selain tiga strategi yang digunakan Ernawati dalam meraih kemenangan, peneliti juga menemukan beberapa dinamika yang terjadi saat menjelang ataupun pasca pemilihan kepala desa. salah satu dinamika yang dianggap dominan membantu meraih banyak suara adalah keberpihakan media sosial (*Facebook* dan *Instagram*) milik Kalurahan Trirenggo yang sering mengunggah kegiatan Ernawati. Hal tersebut membuat masyarakat muda yang bermain media sosial bisa mengenali Ernawati tanpa bertatap muka. Dinamika yang terjadi sah-sah saja dan bukan sebuah pelanggaran karena Ernawati sebelumnya merupakan lurah antar waktu.

Kata kunci : Pilkades, Politik Uang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dilakukan serentak di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 mengindikasikan adanya perkembangan demokrasi pada ranah desa yang lebih baik lagi. Ernawati Kusumaningsih, M.Or seorang perempuan berhasil menang dalam kontes pilkades di Trirenggo. Kemenangan dengan suara telak yang diraih merupakan prestasi luar biasa bagi dirinya sendiri dan bagi Kalurahan Trirenggo karena tanpa menggunakan strategi kotor seperti politik uang atau kampanye hitam. Banyak strategi yang bisa digunakan oleh calon lurah untuk memenangkan pesta demokrasi tingkat desa. beberapa penelitian terdahulu mengatakan politik uang sering digunakan para calon untuk meraih suara terbanyak. Berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh Ernawati Kusumaningsih, M.Or yaitu memanfaatkan modal sosial.

Penelitian yang dilakukan Suyono (2016) di Sidoarjo, menghasilkan sebuah informasi tentang pendekatan yang menjadi faktor dalam mempengaruhi para pemilih. Pertama, melalui pendekatan sosiologis atau lingkungan tempat tinggal, terutama faktor keluarga yang sangat dominan mempengaruhi pemilih menjatuhkan pilihannya kepada calon tertentu. Kedua, pendekatan psikologis yang dimana pemilih akan melihat *track record*, keprofesional dan karismatik dari para calon kepala desa. Ketiga, pendekatan rasional dimana pemilih akan melihat prestasi, keberhasilan, kepandaian memimpin, bebas dari korupsi serta latar belakang pekerjaan menjadi tolak ukur pemilih untuk menentukan siapa yang

dipilih. Pendekatan tersebut berhasil dikuasai oleh Ernawati Kusumaningsih, M.Or. sehingga masyarakat yang memiliki beberapa kendala, diantaranya tidak begitu mengenal para calon, tidak memahami latar belakang para calon serta kurangnya sosialisasi dari panitia pemilihan kepala desa secara menyeluruh bisa teratasi dengan aktivitas yang dilakukan Ernawati.

Namun, dibalik kemajuan demokrasi yang ada di Kalurahan Trirenggo muncul beberapa peristiwa yang menyebabkan dampak negatif dari pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah. Maksudnya, para oknum tertentu menghalalkan segala cara asal menang sehingga akan menimbulkan konflik dan berbagai permasalahan pasca dilaksanakannya pilkades. Padahal menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara langsung merupakan salah satu pintu untuk menciptakan pemimpin desa yang handal serta menggunakan prinsip *handarbeni* dalam mengelola desa. Selain itu, pilkades yang dilaksanakan secara langsung akan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menjadi pemimpin desa dan menghilangkan stigma masyarakat yang bisa menjadi pemimpin adalah keturunan dari pemimpin sebelumnya.

Pemilihan kepala desa secara langsung (Pilkades) memiliki nilai yang tinggi dalam pembangunan demokrasi menuju demokrasi yang sehat dan dinamis. Demokrasi dikatakan sehat apabila masyarakat telah mengalami berbagai macam proses, yang kemudian bisa menghasilkan masyarakat yang cerdas, mandiri dan bermartabat. Dinamika politik yang terjadi di desa memiliki ciri khas tersendiri. Kekhasan tersebut muncul ketika prosesi pemilihan kepala desa yang notabene jauh dari hiruk-pikuk dunia partai politik. Kandidat yang berkompetisi

merebutkan kursi jabatan tertinggi dicalonkan oleh warga atau kemauan diri sendiri tanpa ada campur tangan partai politik. Pilkades merupakan sarana dan kesempatan guna membangun kesadaran untuk melahirkan manusia-manusia yang memiliki pemikiran rasional, jujur, tidak melakukan KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) dan bertanggung jawab. Ahmad Nuris dan Robitul Firdaus (2021) dalam kajiannya mengatakan kecenderungan masyarakat untuk menentukan kandidat kepala desa yang akan dipilih, terbentuk dari beberapa faktor lingkungan, agama, kelompok tertentu dan isu kebijakan politik.

Terselenggaranya pesta demokrasi lokal atau pemilihan kepala desa banyak menimbulkan persoalan diberbagai wilayah. Peristiwa politik uang (*money politics*) hampir selalu hadir dalam even-even pemilihan pemimpin termasuk wilayah desa. Hal ini menjadi salah satu indikator untuk mengetahui tingginya tingkat kecurangan yang dilakukan para aktor dalam pilkades. Politik uang menjadi suatu hal yang sangat hangat dan tidak henti-hentinya dibahas oleh para tokoh pengamat politik, aktifis pegiat pemilihan umum, tokoh pendidikan dan budayawan di berbagai pertemuan terutama dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat juga sering mendiskusikan tentang politik uang yang terjadi, bahkan kasus ini menjadi obrolan menarik bagi masyarakat umum di warung kopi atau angkringan ketika waktu berlangsungnya pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.

Walaupun sudah sering di dengar oleh telinga masyarakat, akan tetapi dimungkinkan masih banyak masyarakat yang belum memahami secara lengkap

apa sebenarnya politik uang? dan apa dampak yang dihasilkan?. Selama ini, beberapa masyarakat hanya mengetahui bahwa siapa yang memberikan uang dalam pemilu, pilkada maupun pilkades itu lah yang di pilih. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di kemudian hari.

Menurut Bunke (2014) bahwa dalam jangka waktu dulu hingga sekarang tidak ditemukan definisi baku mengenai politik uang. Penyebutan politik uang digunakan guna menyatakan korupsi politik, klientelisme serta pembelian suara. Sedangkan pendapat Ismawan (1999), politik uang merupakan usaha mempengaruhi sikap manusia lain dengan menggunakan imbalan. Ada yang berpendapat tindakan jual beli suara saat tahapan-tahapan politik untuk meraih kekuasaan merupakan arti dari politik uang. Tindakan semacam ini dapat terjadi dalam batas (*range*) yang luas, mulai pilkades, pilkada hingga pemilu. Dari dua tokoh yang berpendapat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa politik uang adalah kegiatan mendapatkan suara dengan cara memberikan uang kepada pemilih yaitu orang yang memiliki hak suara saat pemilihan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menyebutkan secara rinci mengenai apa politik uang, akan tetapi diatur dalam pasal yang berisi norma ketentuan larangan dan sanksi yang berhubungan dengan fenomena politik uang. Disebutkan bahwa politik uang merupakan suatu tindak pidana, dengan demikian hal ini merupakan suatu kesalahan yang tidak diperbolehkan terus berlanjut.

Dalam Pemilu ketentuan larangan dan hukuman pidana terkait tindakan politik uang dibagi menjadi empat bagian berdasarkan waktu praktek tersebut dilakukan. Keempat bagian tersebut yaitu praktek politik uang pada saat pemilu

dilaksanakan (hari-h), pada saat kampanye, pada saat masa tenang dan pada saat pemungutan suara berlangsung. Pihak pemberi akan dikenakan ancaman sanksi berupa pidana dengan lama sekitar 2 tahun hingga 4 tahun dan denda sebesar 24 juta sampai 48 juta.

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017 Pasal 515, pemilihan kepala daerah ketentuan larangan dan hukuman terkait politik uang diatur dengan lebih berat. Pihak pemberi dan penerima sama-sama dijatuhi sanksi yang berupa pidana dan denda. Ketentuan hukuman pidana bagi pelanggar minimal 3 tahun penjara dan maksimal 6 tahun penjara serta denda berkisar 200 juta rupiah hingga 1 milyar rupiah.

Aspinall dan sukmajadi (2015) berpendapat bahwa ada beberapa jenis pelanggaran yang termasuk politik uang di Indonesia. pertama, pembelian suara dengan cara distribusi pembayaran uang atau berupa barang lain yang berharga dari calon untuk pemilih. Ada transaksi/barter antara uang dari calon yang nanti akan ditukar suara oleh pemilih saat hari pemungutan suara dilaksanakan. Kedua, pemberian-pemberian yang bersifat pribadi dari calon kepada pemilih sebelum pemungutan suara berlangsung, hal semacam ini diharapkan pemilih yang diberi sesuatu oleh calon merasa hutang budi dan akan membalas dengan cara memberikan suara untuk calon tersebut. Ketiga, pelayanan dan aktivitas. Artinya para calon kerap kali memberikan fasilitas atau hibah dana untuk beragam kegiatan dan pelayanan yang dirasakan oleh pemilih. Contoh nyata di kehidupan masyarakat, para calon mempromosikan dirinya sebagai donatur atau sponsor turnamen olahraga, forum pengajian, demo memasak dan lain sebagainya.

keempat, barang-barang kelompok. Para calon memberikan keuntungan bagi suatu kelompok. Misalnya memberikan bantuan bola voli kepada pemuda disuatu wilayah dengan harapan satu kelompok pemuda pemain voli tersebut kemudian memberikan dukungan kepada calon yang memberi.

Seringnya praktek politik uang dilakukan, membuat sebagian besar masyarakat sudah terbiasa dan beranggapan bahwa fenomena ini wajar dilakukan. Faktor tersebut disebabkan oleh politik uang yang berulang kali dan sangat sering dilakukan, bahkan presentase politik uang terus mengalami peningkatan. Padahal pemilihan langsung hadir di masyarakat salah satunya bertujuan untuk meminimalisir politik uang. Namun, pada saat ini politik uang telah merebak dan sulit di kendalikan. Aturan-aturan yang telah dibuat dan ditetapkan hanya sebagai formalitas belaka, realita yang terjadi tetap banyak yang melanggar.

Menurut Mada (2019) yang merupakan bagian dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, faktor budaya menjadi pengaruh kuat bagi masyarakat yang akan memilih calon kontestan dalam pesta demokrasi. Ada kebiasaan yang dimiliki masyarakat Indonesia kemudian saat ini telah membudaya, yakni sungkan menolak pemberian dan sering membalas pemberian. Instrumen kultural ini menjadi salah satu jalan mudah yang dapat dimanfaatkan para oknum untuk dimasukkan politik uang. Apalagi jika yang dibicarakan wilayah desa, masyarakat desa memiliki ikatan kekeluargaan antar individu yang begitu kuat. Hal ini tentu menjadi nilai positif supaya persatuan juga akan semakin erat. Namun jika kita lihat dari sisi pandang yang berbeda, hal ini menjadi negatif ketika dimanfaatkan oleh para oknum calon pemimpin. Sering

kita jumpai ketika menjelang pesta demokrasi lokal atau pilkades, oknum-oknum kandidat sering mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan berbagai macam hadiah termasuk uang. Kemungkinan besar, ketika perhitungan suara dimulai seluruh masyarakat yang didatangi dan diberi hadiah akan memilih oknum tersebut karena merasa terjalin ikatan kekeluargaan.

Di beberapa daerah fenomena politik uang terlihat sangat terang. Oknum calon kepala desa ditangkap oleh pihak berwajib sesaat sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) karena melakukan praktek *money politic*, hal itu terjadi di Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawungtengen, Kabupaten Cilacap pada tahun 2007. Hal yang mengejutkan, praktek politik uang tidak hanya dimainkan oleh calon kepala desa, keterlibatan bandar judi juga menjadi pendukung cara yang dilarang ini. Dalam penyelenggaraan pilkades, mayoritas akan mengundang bandar-bandar judi dari sekitar desa yang melakukan pemilihan kepala desa. mereka akan meramaikan pasar taruhan dan dimungkinkan akan mempengaruhi hasil pemilihan.

Penelitian dengan topik pilkades dan pilkada yang menggunakan cara politik uang juga pernah dilakukan oleh Rozy beserta temannya (2020) di Desa Sumberingin Kidul, Tulung Agung. Rozy dan temannya menemukan kasus dimana masing-masing calon kepala desa menggunakan strategi politik uang untuk mendapatkan dukungan dan suara masyarakat. Kandidat A memberikan kepada masyarakat uang sebesar Rp. 100.000 hingga Rp. 200.000 sedangkan calon kepala desa B memberikan uang sebesar Rp. 50.000 ditambah barang-barang berupa sarung dan sajadah. Selain teknik memberikan uang kepada setiap

individu, calon kepala desa juga mengadakan pesta dan pertunjukan dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Erviantono (2017), hasil temuannya menyebutkan bahwa masyarakat telah familier dengan praktek politik uang. Masyarakat menganggap hal yang wajar dan maklum jika terdapat calon yang memberikan bingkisan atau amplop yang berisi uang kepada Individu yang memiliki hak pilih sebelum pemungutan suara dilakukan. Hal tersebut dianggap sebagai kompensasi imbalan untuk individu yang hadir ke TPS memberikan suara atau menggunakan hak pilih.

Praktek semacam ini menunjukkan bahwa demokrasi yang berjalan dilingkungan masyarakat belum diimbangi dengan pendidikan politik. demokrasi yang seharusnya diawali dengan tahapan yang lancar serta tidak terdapat konotasi negatif layaknya politik uang guna menciptakan pemimpin yang bisa menjadi panutan, siap mengatur dan mengurus wilayahnya justru menjadi mustahil didapati. Kelemahan penelitian Erviantono dan Rozy beserta para kawannya ialah belum membahas secara tuntas dalam memberikan penjelasan mengenai pola atau strategi yang dimainkan. Selain itu, penelitian yang dilakukan rozy bersama kawan-kawan tidak melakukan wawancara mendalam terhadap kandidat kepala desa, pemilih dan panitia penyelenggara, sehingga dapat memperoleh argumentasi. Hal tersebut dibuktikan hasil wawancara dengan informan tidak disertakan dalam jurnal.

Walaupun politik uang sudah menjamur dalam pemilihan apapun di Indonesia dan tidak mudah untuk dihilangkan, akan tetapi masih ada asa dan harapan bahwa demokrasi di Indonesia suatu saat akan bersih dan jauh dari hal-

hal buruk. Guno Tri Tjahjoko (2019) pernah melakukan penelitian tentang pilkades di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan seorang perempuan berhasil meraih kemenangan tanpa menggunakan politik uang sebagai kekuatan kampanyenya. Strategi yang dilakukan oleh kandidat yang menang menggunakan modal percaya diri, modal sosial, modal jaringan, modal keluarga besar dan sosialisasi saat kampanye.

Tidak jauh berbeda dengan Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Tirirenggo Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu bukti cerdasnya masyarakat dan berintegritasnya salah satu calon dalam perhelatan pemilihan kepala desa. Pesta demokrasi lokal yang telah dilakukan serentak se-Kabupaten Bantul pada tahun 2022 berjalan dengan lancar, namun munafik jika mengatakan nihil pelanggaran. Di Kalurahan Tirirenggo sendiri terjadi beberapa pelanggaran mulai dari perusakan alat peraga kampanye, teror kepada calon kepala desa hingga disinyalir terjadi bagi-bagi bingkisan yang termasuk dalam kategori politik uang. Dinamika politik yang terjadi tensinya tinggi dan beberapa kali memanas. Ada satu hal yang kemudian masyarakat merasakan kesejukan pasca pilkades selesai. Yakni terpilihnya Ernawati Kusumaningsih M.Or. secara mutlak 50% lebih bahkan menang dikandang lawan. Selama kampanye beliau benar-benar bersih tanpa politik uang dan kampanye hitam.

Kejadian tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji power yang dimiliki Ernawati Kusumaningsih M.Or. yang berani melawan kebiasaan dalam demokrasi yaitu politik uang dan kampanye hitam. Selain itu, bisa menang dikandang lawan juga poin yang harus digali agar kedepan bisa menjadi literatur

review dan penggugah semangat untuk calon-calon pemimpin dimasa depan. Hasil penelitian kali ini akan menjadi perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guno Tri Tjahjoko. Hampir sama akan tetapi kebaruan dari kajian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dalam menjelaskan pola yang dibangun atau strategi yang dilakukan calon lurah dalam pilkades. Dalam penelitian sebelumnya strategi modal sosial hanya disebutkan saja, sedangkan kali ini penulis mengupas tentang modal sosial yang digunakan calon dalam menarik simpati masyarakat. Strategi yang ditulis oleh peneliti dijelaskan secara rinci dibanding kajian yang sebelumnya melalui sudut pandang calon lurah pemenang dengan diselaraskan pandangan dari masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang pada intinya mengatakan bahwa oknum-oknum politisi di Indonesia dari tingkat pusat maupun lokal telah terdoktrin pemikiran jalan paling mudah untuk menang adalah bermain politik uang. Hal itu memang terbukti nyata di beberapa daerah ketika terjadi perhelatan pemilu, pilkada maupun pilkades. Akan tetapi yang menarik, Kalurahan Trirenggo membuktikan bahwa tanpa mempraktekan politik uang bisa meraih kesempatan untuk duduk sebagai pemimpin. Di pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bantul tepatnya di Kalurahan Trirenggo pada tahun 2022 ada calon yang menarik perhatian dari berbagai pihak, dimana beliau tidak menggunakan politik yang kotor akan tetapi justru menang telak dari para lawannya . Dari hal tersebut kemudian muncul rumusan masalah penelitian : mengapa lurah bisa menang telak tanpa menggunakan politik uang sebagai strategi ?

C. Fokus Penelitian

Pada kesempatan ini, peneliti memiliki fokus penelitian tentang kemenangan Ernawati Kusumaningsih, M.Or di Kalurahan Tlirenggo pada Pemilihan kepala desa tahun 2022. Peneliti berusaha :

1. Mengupas strategi atau penyebab Ernawati Kusumaningsih M.Or. menang telak atas lawannya tanpa menggunakan politik uang.
2. Mengetahui alasan masyarakat secara sukarela memberikan suara dan tidak tertarik dengan iming-iming uang serta begitu kuat memberikan dukungan kepada Ernawati Kusumaningsih M.Or. selain itu, peneliti dalam mengungkap strategi pemenangan yang digunakan tidak hanya bersumber dari Ernawati Kusumaningsih, M.Or. akan tetapi juga melalui sudut pandang masyarakat selama tahapan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Bantul tahun 2022 dilaksanakan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, adapun tujuan dalam penulisan ini ialah :

1. Penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui alasan Lurah Tlirenggo yaitu Ernawati Kusumaningsih, M.Or. yang memilih jalan terjal dan tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kontestasi politik terutama dalam pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bantul tahun 2023. Padahal cara-cara curang menjadi jalan pintas dengan peluang kemenangan lebih besar dan sudah dianggap wajar di lingkungan masyarakat.

2. Mengetahui pola pikir masyarakat Tlrenggo dalam perhelatan pesta demokrasi. Peneliti akan berusaha mengungkap apa yang membuat masyarakat memilih Ernawati yang selama proses kampanye yang jauh dari perilaku politik uang. Satu hal yang menarik apabila semua masyarakat memiliki pemikiran yang sama (anti terhadap politik uang) dan hal ini dapat dibentuk melalui pemahaman-pemahaman/seminar setelah hasil penelitian diketahui.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan yang dilakukan tentu tidak semata-mata hasilnya kosong, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari kajian penelitian. Beberapa manfaat yang diharapkan adalah :

1. Sebagai referensi dan pemacu semangat generasi-generasi penerus bahwa tidak selamanya ketika ingin menduduki jabatan harus dengan uang dan cara-cara yang tidak dibenarkan. Bermodalkan niat yang baik dan aktif diberbagai elemen masyarakat bisa meraih kemenangan dalam pilkades.
2. Pembuktian bahwa masyarakat semakin cerdas dalam dunia demokrasi. Jika ada masyarakat yang masih belum paham dengan bagaimana memilih calon yang benar, maka hasil dari penelitian ini akan membuka mata hati para pemilih tersebut. Uang dari oknum kandidat tentu hanya manis diawal saja dan berdampak negatif dikemudian hari.
3. Bahan dasar untuk membuat strategi pemenangan dalam pemilihan kepala desa tanpa politik uang.

4. Bentuk kritik terhadap para oknum politisi yang bermain dengan menghalalkan segala cara. Bukti nyata bahwa tanpa politik uang dan kampanye hitam Trirenggo mampu mendapatkan pemimpin yang diharapkan masyarakat.

F. Kerangka Konseptual

Hanya ada dua bagian dalam kerangka konseptual, akan tetapi bagian-bagian tersebut dipaparkan secara terperinci mulai dari pengertian luas hingga lebih spesifik, yaitu tentang demokrasi desa dan pemilihan kepala desa yang dimenangkan berdasarkan modal sosial. Pada poin pertama, diawali dengan pembahasan mengenai demokrasi secara umum, kemudian berbicara mengenai seperti apa konsep sebenarnya yang menjadi ciri khas demokrasi yang ada di Indonesia hingga memberikan gambaran demokrasi yang ada di desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Terdapat Teori para ahli dan beberapa kutipan yang ditulis oleh peneliti, seperti Karl Popper, Aristoteles, Montesquicu, Firmanzah dan Tjahjoko. Pada poin kedua, menuliskan konsep tentang pemilihan kepala desa sebagai bentuk pesta demokrasi yang dilakukan enam tahun sekali. Penyelenggaraan kepala desa yang bertujuan meningkatkan partisipasi rakyat dalam setiap proses pembangunan tidak selamanya berjalan mulus. Banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi pada pra maupun pasca pilkades dilaksanakan. Salah satu gangguan yang paling umum muncul adalah praktek politik uang, strategi ini akan merusak sistem demokrasi yang semestinya. Pada konsep ini, catatan dari kajian sebelumnya lebih banyak dikutip oleh peneliti untuk menegaskan pengertian-pengertian yang

telah ditulis. Tetapi yang menarik, tidak selamanya strategi politik uang ini dapat unggul. Ada strategi yang tidak mengeluarkan materi terlalu banyak namun dapat diterima oleh masyarakat yaitu modal sosial. Peneliti menuliskan teori Pierre Bourdieu untuk lebih menjelaskan modal sosial.

1. Demokrasi Desa

Secara kata, demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno (*demokratia*) berarti “kekuasaan rakyat”. Secara etimologi, jika dijabarkan lagi terbentuk dari dua kata, “*demos*” artinya rakyat dan “*kratos*” berarti kekuatan atau kekuasaan. Pemerintahan yang demokratis bertolak belakang dengan sistem pemerintahan yang kekuasaannya bertumpu pada satu kekuatan tertentu atau kepada satu orang saja, seperti negara monarki. Imelda Lambertini (2021) mengutip pendapat Karl Popper yang mengatakan bahwa demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, demokrasi memiliki fokus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memegang kendali dalam mengontrol para pemimpin terutama pemimpin yang tidak amanah sehingga jika terjadi kasus yang tidak diinginkan rakyat bisa memecat tanpa perlu revolusi.

Demokrasi merupakan suatu tatanan dalam negara yang memperbolehkan rakyatnya memilih secara langsung tokoh-tokoh yang akan menjadi pemimpin mereka di dalam badan pemerintahan. Aristoteles berpandangan dalam konteks demokrasi wujud kedaulatan rakyat adalah memilih secara langsung pemimpinnya, rakyatlah yang berdaulat bukan negara atau elite politik. sebab secara esensi demokrasi ialah kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat (Tjahjoko, 2019). Dalam negara demokrasi, keputusan-keputusan terkait kebijakan dan lain sebagainya

dilakukan berdasarkan kesepakatan mayoritas secara bebas tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Demokrasi sendiri memerlukan waktu yang panjang untuk dapat bertransformasi seperti sekarang ini sehingga kita bisa menikmatinya, dalam tulisan Firmanzah (2012). Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan persamaan hak kepada setiap warga negara untuk berpendapat atau bersuara untuk pengambilan keputusan guna mengubah hidup mereka. Dalam proses pembuatan aturan dan hukum, negara demokrasi membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat mulai dari perumusan hingga penetapan kebijakan baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Demokrasi tidak hanya mencakup urusan kebebasan berpendapat dalam aturan dan hukum saja, akan tetapi meliputi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang didalamnya terdapat berbagai kemungkinan adanya praktik kebebasan politik. Jika kita gali lebih dalam lagi, hadirnya demokrasi memiliki makna sebagai bentuk apresiasi terhadap harkat dan martabat manusia.

Landasan demokrasi meliputi berbagai macam kebebasan, yaitu kebebasan rakyat untuk melakukan perkumpulan, kebebasan berserikat, kebebasan menyuarakan pemikiran, inklusivitas dan kebebasan dalam berpolitik dan kebebasan-kebebasan lain yang bersifat positif. Terdapat banyak jenis di dalam demokrasi, akan tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya memberikan pemahaman tentang prosedur seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berperan secara langsung dan aktif dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh

pemerintah. Bentuk kedua, demokrasi tidak langsung yang banyak ditemui di beberapa negara demokrasi modern. Seluruh warga negara merupakan pemegang kekuasaan yang berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung atau melalui dewan perwakilan. Beberapa negara di dunia khususnya Indonesia, dalam membentuk pemerintahan yang demokratis menggunakan pemikiran seorang tokoh ahli yang bernama Montesquieu. Dalam pembagian kekuasaan politik dalam kelembagaan dikenal adanya *trias politica* (lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Demokrasi Indonesia tidak hanya setingkat pusat akan tetapi juga sampai tingkat bawah yaitu desa. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui oleh negara, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai batas wilayah yang ditetapkan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat didasarkan pada prakarsa, usulan dan budaya tradisional yang ada dilingkungan masyarakat setempat dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional. Walaupun sebagai wilayah administrasi terkecil disuatu negara, akan tetapi banyak desa yang secara ukuran termasuk luas. Dengan demikian desa masih dibagi lagi menjadi kesatuan-kesatuan wilayah yang kecil dengan sebutan padukuhan atau dusun yang dipimpin oleh pembantu kepala desa yang disebut dukuh. Dengan struktur sedemikian rupa, organisasi pemerintahan desa tidak jauh berbeda dengan organisasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Proses mengembangkan dan memajukan desa diperlukan demokrasi yang bersih agar tercipta relasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga ketika relasi sudah baik maka partisipasi dari masyarakat akan

maksimal. Demokrasi bagi desa merupakan suatu pembaharuan terhadap hubungan antar organisasi-organisasi pemerintahan desa, pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) beserta PKK, Karang Taruna dan seluruh lapisan masyarakat. Lingkungan masyarakat desa dalam menentukan keputusan selalu didominasi dengan cara musyawarah ataupun gotong-royong, inilah yang kemudian menjadi lambang demokrasi desa.

Pesta demokrasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa tingkatan, ada pilpres dan pemilu ditingkat pusat, pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pilkades di tingkat desa. Pemerintahan desa saat ini menjadi hal yang sedang hangat dibicarakan oleh publik, hal itu disebabkan adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, didalamnya terdapat aturan mengenai pemilihan kepala desa yang diselenggarakan secara langsung dan pembatasan periode jabatan kepala desa maksimal tiga kali dengan masa jabatan setiap periode enam tahun.

Perubahan sistem pemerintahan desa di Indonesia dengan disahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentag Desa, menerangkan jika pemerintah desa merupakan pelaksana urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat diwilayah suatu desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan berjalannya waktu atas keterlibatan desa dalam administrasi degara, desa menjadi bagian terkecil dalam struktur pemerintahan negara. Komando tertinggi pemerintah desa dipegang oleh kepala desa, jika di Daerah Istimewa Yogyakarta ada aturan khusus yakni Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan, salah satu

didalam aturan tersebut berisi tentang penyebutan kepala desa yang bisa disebut dengan lurah. Dalam melaksanakan tugas-tugas kepala desa dibantu oleh sekretaris desa atau dengan nama lain carik, seriang, penyarikan, juru tulis dan sebutan yang lainnya. Pembantu kepala desa tidak hanya sekdes, melainkan juga pamong-pamong desa yang menangani bagian atau bidangnya masing masing. Misalnya jagabaya dibagian keamanan, ulu-ulu bidang kesejahteraan, kaum rois bidang keagamaan dan lain-lain.

Dari berbagai macam sektor demokrasi yang ada di desa, Pilkades menjadi salah satu yang paling menarik untuk di bahas mengenai penerapan demokrasi di desa. Pemilu tingkat desa merupakan sarana yang paling ampuh dan mengena jika dimanfaatkan sebagai pembelajaran politik untuk masyarakat. Pada aktivitas pilkades, masyarakat memiliki hak pilih untuk menentukan siapa pemimpinnya selama 6 tahun. Kemudian dalam proses pelaksanaan keterkaitan antara pihak-pihak yang berpartisipasi sangat mendetail, sehingga masyarakat yang memiliki hak suara harus lebih cermat untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Suasana pilkades akan lebih panas dan spesifik jika dibandingkan dengan pilkada ataupun pilpres, karena kedekatan pemilih dan calon kepala desa lebih dirasakan.

Para kandidat yang mencalonkan diri biasanya sudah dikenal oleh masyarakat sekitar, oleh karena itu tidak perlu lagi memperkenalkan diri namun lebih condong ke arah adu visi-misi. Sosialisasi program harus dijadikan daya tawar kampanye dan pendidikan politik yang baik. Pilkades hadir sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, harapannya dengan partisipasi masyarakat yang tinggi demokrasi di desa dapat berjalan optimal. Sri Lestari (2012)

menyatakan pendapatnya bahwa salah satu wujud dari demokrasi adalah pemilihan kepala desa secara langsung, dalam pilkades masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat aktif dalam dunia politik secara nyata serta menggunakan hak suara dan memilih tanpa paksaan atau introgasi dari siapapun sehingga berlangsung secara demokratis.

2. Strategi Pemenangan Pilkades

Pilkades adalah salah satu bentuk pesta demokrasi yang hasilnya paling dekat dengan rakyat. Pemilihan kepala desa atau pilkades bisa dikatakan sebagai pemilu yang dilenggerakan tingkat desa sebagai ajang kompetisi politik sekaligus pembelajaran politik bagi masyarakat pedesaan. Pilkades berguna untuk menentukan pemimpin wilayah desa selama 6 tahun kedepan pasca pengumuman hasil pemilihan. Bentuk pesta demokrasi yang telah digelar dalam kehidupan politik Indonesia sangat beragam, antara lain pemilihan presiden (Pilpres), Pemilihan kepala daerah provinsi/kab/kota (Pilkada), pemilu legislatif dan paling bawah pemilihan kepala desa (pilkades). Pemilihan kepala desa terasa lebih spesifik di banding pemilihan-pemilihan umum yang tingkatannya lebih tinggi. Dikatakan lebih spesifik karena terdapat kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara para calon dengan pemilih. Calon kepala desa biasanya sudah dikenal oleh para warga yang telah memiliki hak pilih. Dalam proses kampanye seringkali menitik beratkan kedekatan pribadi dari pada saling beradu visi maupun misi. Unsur-unsur nepotisme dan kolusi kemudian menjadi hal yang dianggap biasa saja dan membudaya. Selain itu money politik beberapa kali menjadi jurus andalan bagi para calon kepala desa di beberapa desa yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, suhu politik di lokasi desa yang menyelenggarakan akan terasa lebih panas dibanding dengan pilpres, pilkada atau pemilu yang lain.

Pilkades merupakan bagian dari proses aktivitas politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Dimulai dari partisipasi masyarakat menentukan kepala desa sesuai kehendak pribadi, diharapkan akan terjadi perubahan-perubahan positif yang signifikan di tingkat desa. maknanya adalah masyarakat dilatih untuk merasa memiliki dan peduli kepada pemimpinnya serta sadar terhadap apa, siapa dan bagaimana pemimpin yang dipilih. Atmosfir pilkades tentu lebih panas daripada pilkada ataupun pemilu karena calon lebih dekat dan saling kenal dengan masyarakat. Perubahan budaya politik masyarakat yang sebelumnya mengutamakan musyawarah dan gotong-royong diganti dengan budaya pemilihan langsung (*individual*) membuat sebagian masyarakat kaget dan terlalu fanatik. Dampak dari penerapan kebebasan dan pemberian hak dalam pemilihan kepala desa mendatangkan berbagai macam permasalahan di desa. permasalahan tersebut yakni berkembangnya strategi politik uang (*money politics*), patronase-klientelisme, hingga orang kuat lokal (*local strongman*). Selaras dengan apa yang dikatakan Firdaus (2020) dalam membentuk pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan sedemikian rupa. Oleh karena itu, problema dan dinamika politik menjadi hal wajib yang harus dilewati oleh seseorang yang akan mendapatkan kursi jabatan di pemerintahan.

Kajian terdahulu dalam konteks pilkades yang dilakukan oleh Fitriyah (2015), Kazali (2020) dan Rozy (2020) dengan kompak mengatakan bahwa maraknya politik uang disebabkan oleh pemikiran bahwa semakin besar dan

semakin banyak kandidat kontestan memberi uang/barang kepada masyarakat yang memiliki hak pilih maka peluang meraih kemenangan juga semakin besar. Selain itu, Basri (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa demokrasi di desa mulai tercemar. Secara sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat awam, politik uang bisa dikatakan sebagai jual-beli suara. Kandidat kontestan demokrasi (calon legislatif, gubernur, bupati, dll) memberikan uang atau berupa barang kepada masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, kemudian saat pencoblosan masyarakat yang diberi tersebut wajib memilih pemberi. Artinya terjadi transaksi uang/barang ditukar dengan suara masyarakat yang memilih saat pemilu, pilkada bahkan pilkades.

Juliansyah (2007) memiliki pendapat bahwa politik uang merupakan suatu usaha mempengaruhi individu lain dengan memberikan imbalan uang/barang dan bisa juga dimaknai sebagai transaksi jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan aktivitas memberikan uang baik milik sendiri atau partai untuk mempengaruhi *voters* (suara pemilih). Politik uang dalam pilkades mungkin sudah tidak asing lagi, walaupun ini adalah cara yang sesat, dilarang dan ada sanksi bagi para pelanggar. Mengenai aturan dan sanksi sudah sedikit disinggung dalam latar belakang. Fenomena yang tumbuh subur di lingkungan sosial masyarakat Indonesia ibarat sebuah benalu yang menghisap dan merusak pohon yang dihinggapi. Politik uang sangat mengganggu dalam pembangunan demokrasi yang baik karena dampaknya sangat berbahaya.

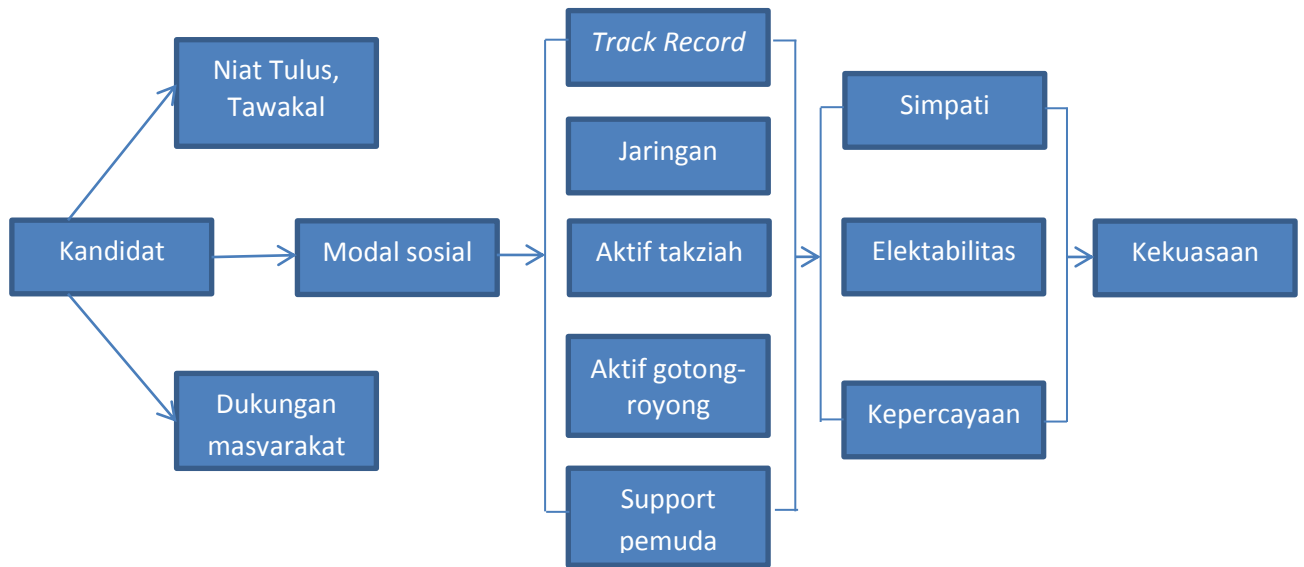
Beberapa dampak negatif dari politik uang bagi demokrasi diantaranya : pertama, merendahkan martabat masyarakat. Para calon, tim kampanye ataupun

partai politik yang melakukan tindakan politik uang secara tersirat membuat masyarakat seakan-akan menjadi obyek yang hak nya dapat dibeli, padahal seharusnya rakyat sebagai subjek yang dapat menentukan pilihannya secara bebas. Inilah yang membuat pandangan bahwa politik uang dapat merendahkan martabat masyarakat. Kedua, menciptakan ketergantungan dan menimbulkan masyarakat yang tidak mandiri secara politik. Masyarakat secara substansi sebagai pemegang penuh kedaulatan sudah mulai memudar posisinya, karena suara telah dibeli sehingga ada ikatan yang membuat masyarakat tidak bebas bersuara dalam menentukan pemimpin dan kebijakan yang akan dihadirkan. Ketiga, kekuasaan politik yang sebelumnya menjadi masalah publik dengan dipertanggungjawabkan secara akuntabel akan berubah menjadi masalah privat/individu. Dimana pemimpin yang terpilih melalui politik uang tentu akan memikirkan bagaimana uang yang telah keluar banyak tersebut bisa kembali lagi dan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, menghilangkan tindakan kritis masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Masyarakat yang menerima sesuatu berupa materi atau yanglainnya dari calon/pejabat tentu akan sungkan memberikan masukan-masukan dan cenderung lebih mengikuti arus. Kelima, membuka kesempatan untuk para oknum melakukan perilaku korupsi. Pemimpin hasil politik uang dimungkinkan menggerogoti anggaran negara untuk mengembalikan modal individu selama kampanye.

Namun, tidak selamanya pemilihan kepala desa menggunakan strategi negatif. Kandidat pemenang pilkades di Kalurahan Tlirenggo sama sekali tidak menggunakan politik uang, cara jitu yang digunakan yaitu modal sosial. Menurut

Piere Bordieu dalam bukunya, modal sosial merupakan gabungan seluruh sumberdaya baik dari kejadian yang masih hangat maupun yang potensial terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Dari pendapat Piere Bordieu, dapat dipahami bahwa modal sosial ialah norma-norma informal yang dimiliki bersama antara individu ataupun kelompok masyarakat yang saling berkaitan, dasarnya adalah nilai kepercayaan dan jaringan sosial. Sedangkan Piere bordieu menegaskan kembali pendapatnya dalam George Ritzer (2007) modal sosial diartikan sebagai sekumpulan sumberdaya (*asset*) yang mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok elite. Francis Fukuyama (2002:42-45) mengatakan bahwa modal sosial merupakan serangkaian nilai atau norma-norma informal yang bisa dengan cepat mendukung kerjasama antar individu masyarakat dan kemudian norma informal tersebut akan menciptakan hubungan timbal-balik antara pihak-pihak yang saling berkaitan dan dilandasi rasa kepercayaan.

Gambar 1.1. Strategi Pemenangan Pilkadaes Trirenggo, Bantul



Gambar 1.1. tersebut dibuat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ernawati selaku calon lurah pemenang dan perwakilan warga masyarakat Trirenggo. Dalam wawancara Ernawati menyebutkan dirinya maju menjadi calon lurah Trirenggo pada Pilkadaes 2022 karena dorongan dari masyarakat Trirenggo itu sendiri. Niat tulus dan rasa percaya diri yang muncul setelah mendapatkan restu orangtua semakin menambah tekad Ernawati untuk mengabdikan kepada masyarakat. Kemudian berdasarkan pengakuan dari beberapa informan, modal sosial yang dilakukan Ernawati menjadi alasan para warga menjatuhkan pilihan kepadanya saat pemilihan kepala desa. Kepercayaan masyarakat tumbuh karena *track record* Ernawati sebagai lurah antarwaktu selama 2 tahun membawa perubahan positif.

Dimata masyarakat keaktifan Ernawati dalam berbagai kegiatan seperti gotong-royong, jaringan pengajian, dekat dengan pemuda dan aktivitas lain membuat dirinya dikenal oleh masyarakat sehingga elektabilitas meningkat.

Rajinnya beliau takziah ketika ada warga yang meninggal, membuat keluarga duka menjadi bersimpati dan merasa berhutang budi. Akhirnya, kemenangan dapat diraih tanpa mengeluarkan strategi politik uang.

G. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagai metode penulisan kajian. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menggali informasi secara dalam dan terbuka dalam berbagai tanggapan. Penelitian ini membuat orang untuk mengeluarkan pemikiran mereka terhadap suatu permasalahan. Berdasarkan pemahaman tersebut, studi kasus dipilih sebagai metode kajian karena mempunyai kelebihan dalam memberikan penjelasan suatu topik atau fenomena dengan lebih mendalam. Selain itu metode studi kasus juga mempunyai keunggulan dalam menghasilkan pengetahuan (teori) yang relevan melalui pemaparan yang dilakukan secara komprehensif. Singkatnya, penelitian dengan metode studi kasus berusaha mengungkap masalah yang begitu banyak (kompleks) dengan teknik observasi, pengumpulan data wawancara dan diskusi guna membangun suatu kerangka pikir (pengetahuan).

Data primer dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara dan diskusi mendalam terhadap sepuluh orang (10) orang yang terdiri dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, pengurus karang taruna, perwakilan ketua TPS, warga masyarakat dan mahasiswa. Teknik wawancara dan diskusi mendalam yang dilakukan oleh peneliti kali ini adalah wawancara semi terstruktur. Dipilihnya wawancara semi terstruktur karena memiliki tujuan untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka, individu yang menerima pertanyaan bisa diminta untuk mengeluarkan pendapat dan ide nya.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan secara bergantian, dimulai dari pemerintah desa yaitu Lurah Trirenggo pada tanggal 23 Februari 2023 di rumahnya dusun Gempolan Kulon, Trirenggo, Bantul. Pokok pertanyaan penulis terhadap Ernawati Kusumaningsih, M.Or ialah tentang alasan Ernawati mencalonkan diri menjadi salah satu kontestan dalam pesta demokrasi lokal dan mengapa Ernawati sangat menjauhi politik uang serta cara buruk yang lain. Kemudian narasumber yang lain tanggalnya menyesuaikan, kebanyakan wawancara dilakukan dirumah informan diantaranya beralamatkan Dusun Sragan, Gempolan, Bogoran, Bakulan, Tanuditan dan Nogosari.

Warga Sragan menjadi penyumbang informan paling banyak karena merupakan kandang dari lawan Ernawati, akan tetapi di TPS dusun ini Ernawati berhasil meraih kemenangan dengan selisih suara yang cukup banyak. Alfian Ihsan selaku ketua TPS 06 Dusun Sragan dalam wawancara pada tanggal 16 Maret 2023 menyampaikan informasi mengenai alasan warga masyarakat Sragan lebih memilih Ernawati daripada Ayom Yuswandono yang merupakan warga sragan sendiri. Pada tanggal yang sama, peneliti juga menemui informan yang bernama Mahmudah (rois pemerempuan) warga Dusun Sragan, Alfian Ihsan selaku ketua TPS Sragan, Arunda Azhar Cahyadi (masyarakat) warga Dusun Sragan, Auliya Laela Dzakiyah (relawan kesehatan) warga Dusun Sragan, Ramiyem (masyarakat) warga Dusun Sragan, Fanny Anynda (sekretaris karang taruna) warga dusun Gempolan Kulon dan Siti Fatimatuzzahra (mahasiswa)

warga Dusun Bogoran. Di hari berikutnya peneliti menghubungi narasumber bernama Gita (anggota karang taruna) warga Dusun Bakulan, Nurul Nafi (masyarakat) warga Dusun Tanuditan dan Risty Hayu dari Code. Dari beberapa narasumber tersebut pertanyaan yang diberikan oleh peneliti hampir sama yaitu tentang apakah narasumber memberikan dukungan terhadap Ernawati? Lalu alasan apa yang menjadikan Ernawati sebagai pilihan?.

Terakhir peneliti melakukan wawancara kembali dengan Lurah Trirenggo terpilih yakni Ernawati Kusumaningsih, M.Or pada tanggal 10 April 2023. Peneliti menanyakan tentang strategi yang digunakan oleh Ernawati sehingga berhasil meraih kemenangan tanpa *money politic*.

Peneliti akan menggunakan dokumentasi berupa tulisan dan gambar sebagai salah satu bukti dalam mencari data dan fakta untuk menambah data sekunder. Dalam kajian ini peneliti mendapatkan dokumentasi sebagai data sekunder berupa profil Kalurahan Trirenggo, papan struktur Pemerintah Kalurahan Trirenggo dan dokumen-dokumen lainnya. Profil kalurahan didapatkan melalui web *Trirenggo.Id* sedangkan profil calon lurah di dapatkan melalui wawancara dan jejak digital. Penulis juga menyertakan hasil perhitungan suara sebagai data sekunder, hasil tersebut diperoleh melalui postingan di internet dengan alamat investigasi86.com. Dokumentasi akan disisipkan pada lampiran oleh peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian berisi tahapan-tahapan mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Hal pertama yang dilakukan ialah

collection data (pengumpulan data). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Kedua, *reduction data* (reduksi data) dipakai guna menajamkan, menggabungkan, mengorganisasikan dan membuang data yang tidak penting sehingga memudahkan peneliti menganalisis hasil pembahasan. Ketiga, *display data* (penyajian data). Kegiatan ini memberikan petunjuk penulis untuk menyajikan gabungan data yang diperlukan sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan dengan singkat dan benar. Sajian data kualitatif ini berupa teks naratif yang berbentuk catatan di lapangan ditambah beberapa bagan. Dengan demikian, pada kajian ini data disajikan dengan sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari kajian yang dilakukan (*conclution drawing*).

Penelitian ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi hambatan pasti ditemui. Hambatan yang paling dirasakan ialah kesulitan dalam menemukan data primer melalui wawancara. Mayoritas warga masyarakat sulit ditemui peneliti dan tidak berkenan dijadikan narasumber dengan berbagai alasan. Alasan yang paling sering muncul adalah 'takut' salah menyampaikan informasi. Masyarakat beranggapan bahwa hal-hal yang memiliki hubungan dengan kontestasi demokrasi lokal yakni pilkades sangat sensitif. Selain itu masyarakat enggan dijadikan narasumber karena merasa pendidikannya rendah dan tidak pantas berbicara tentang politik di desa. Hambatan lain yang hadir adalah padatnya aktivitas sehari-hari diluar rumah seperti bekerja mencari nafkah yang dilakukan oleh narasumber. Sehingga, pertemuan untuk wawancara beberapa kali harus ditunda dan pada akhirnya ada yang melalui aplikasi komunikasi yaitu

whatsapp. Penulis memuat daftar informan wawancara dalam bentuk tabel dibawah ini. Tujuan dimuatnya tabel tersebut untuk memaparkan lebih rinci mengenai informan yang ditunjuk dalam penelitian ini.

Tabel 1.1 Daftar Nama Informan

No.	Nama	Dusun	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1.	Ernawati Kusumaningsih	Gempolan Kulon	S2	Lurah
2.	Alfian Ihsan Prayoga	Sragan	S1	Ketua TPS 06
3.	Ramiyem	Sragan	SLTP	Masyarakat
4.	Mahmudah	Sragan	SLTA	Kaum Rois
5.	Auliya Laela Dzakiyah	Sragan	D3	Relawan
6.	Fanny Anynda	Gempolan Kulon	SLTA	KT. Tirenggo
7.	Siti Fatimatuzzahra	Bogoran	SLTA	Mahasiswa
8.	Danu Rogo Jati	Kweden	S1	Ketua KT
9.	Nurul Nafi	Tanuditan	S1	Masyarakat
10.	Risti Hayu	Code	SLTA	Masyarakat

Hasil catatan dilapangan Tahun 2023

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN TRIRENGGO DAN PROFIL CALON LURAH

A. Sejarah Kalurahan Tpirenggo

Kalurahan Tpirenggo merupakan kalurahan yang letaknya masuk dalam wilayah Kapanewon Bantul. Letak yang sangat strategis karena termasuk dalam Ibukota Kabupaten Bantul. Tpirenggo memiliki makna yang sangat erat dengan budaya jawa, kata Tri dalam Bahasa Jawa memiliki arti tiga. Hal ini merupakan filosofi bahwa Kalurahan Tpirenggo pada awalnya merupakan penggabungan dari tiga wilayah yang berbeda. Wilayah yang bergabung yaitu dari sebelah utara ada Kalurahan Niten, bagian tengah Kalurahan Nogosari dan wilayah selatan Kalurahan Batikan. Berdirinya Kalurahan Tpirenggo pada hari Sabtu Wage tanggal 23 November 1946 atau 28 Besar 1877 Jimawal, Windu Kunthara, Wuku Dhukut atau 28n Dzulhijjah 1365 H.

B. Visi dan Misi Kalurahan Tpirenggo

Visi

Terwujudkan masyarakat Tpirenggo yang guyup rukun, maju dan sejahtera melalui penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang partisipatif.

Misi

1. Mengembangkan SDM masyarakat Tpirenggo yang bertaqwa, sehat, unggul dan berbudaya.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kalurahan yang amanah, transparan, partisipatif dan akuntabel.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi kerja antara perangkat kalurahan, mitra kalurahan dan seluruh unsur masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Kalurahan Trirenggo yang partisipatif, akuntabel secara administratif dan sosial.
5. Memperkuat tumbuhnya perekonomian, pendidikan, kesehatan masyarakat di Kalurahan Trirenggo.

C. Nama Lurah Yang Pernah Menjabat

Sejak Kalurahan Trirenggo berdiri pada tahun 1946 hingga saat ini tahun 2023 tentu sudah beberapa kali terjadi pergantian pemimpin. Menurut data yang diperoleh, sudah ada lima orang yang pernah mencicipi kursi kepala desa di Kalurahan Trirenggo. Kelima orang tersebut tertulis dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1Daftar Lurah Kalurahan Trirenggo

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	R. Sukarjan	1946 s/d 1982	Lurah Pertama
2.	Kasimin S. Hadi	1982 s/d 2004	Lurah Kedua
3.	Nurhandoko, S.T	2004 s/d 2016	Lurah Ketiga
4.	Munawar	2016 s/d 2020	Lurah Keempat
5.	Ernawati Kusumaningsih, M.Or.	2020 s/d 2022	Lurah Kelima (lurah antar waktu)
6.	Ernawati Kusumaningsih, M.Or.	2022 s/d 2028	Lurah Kelima (hasil pilkades)

Sumber : Trirenggo.id

R. Sukarjan menjadi Kepala Desa pertama kali setelah Kalurahan Trirenggo di nyatakan berdiri pada era pasca proklamasi kemerdekaan. Beliau

menjadi kepala desa dengan rentang waktu yang paling lama pula yaitu 36 tahun, mulai dari tahun 1946 hingga tahun 1982. Setelah R.Sukarjan purna tugas kemudian di gantikan oleh Kasimin S. Hadi dengan lama masa jabatan 22 tahun. Diurutan ketiga, ditempati oleh Nurhandoko, S.T yang mulai menjabat pada tahun 2004 hingga 2014. Setelah masa jabatan Nurhandoko, S.T habis, dalam pemilihan kepala desa yang baru pada tahun 2016 menyatakan bahwa pemenangnya adalah Munawar.

Dalam menjabat Kepala Desa Trirenggo, Munawar tidak bisa menyelesaikannya hingga masa kepemimpinannya habis. Beliau menjabat hanya 4 tahun karena harus kembali ke pangkuan Tuhan yang Maha Esa. Setelah munawar wafat, diadakan pemilihan lurah baru dengan seleksi yang ketat kemudian calon-calon yang lolos seleksi dipilih oleh perwakilan warga (RT). Ernawati Kusumaningsih, M.Or berhasil menjadi penerus Munawar untuk menghabiskan masa jabatan yang masih tersisa 2 tahun.

Kemudian pada tahun 2022 diadakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bantul dan Trirenggo termasuk mengikuti gelaran pesta demokrasi tersebut. Ernawati Kusumaningsih, M.Or menjadi salah satu kontestan calon kepala desa dan berhasil memenangkan pilkades tersebut. Hingga akhirnya beliau menjabat lurah kembali hingga nanti tahun 2028. Menurut Alfian Ihsan dalam wawancara di Balai Kalurahan Trirenggo, dari beberapa Lurah Trirenggo yang pernah menjabat paling dekat dengan masyarakat adalah Ernawati. Beliau terkenal ramah dan bisa membaur dengan semua lapisan masyarakat mulai dari pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, difabel dan lain sebagainya tanpa ada perbedaan. Perlakuan

beliau terhadap warga sama baiknya dan selalu terbuka menerima masukan. Sehingga tumbuh rasa cinta dari warga untuk Ernawati.

D. Pemerintah Kalurahan

Dalam pembahasan ini, jabatan kepala desa atau lurah merupakan jabatan politik. Alasan yang paling dasar adalah kepala desa dipilih secara langsung melalui pilkades oleh masyarakat. Tentu pemilihan tersebut sebagai tanda hadirnya demokrasi di dalamnya, terlebih ke arah demokrasi liberal. Ciri utama demokrasi liberal ialah mengedepankan *one man, one vote, one value*. Jabatan kepala desa yang termasuk jabatan politik, kemungkinan banyak orang yang ingin merebutkan kedudukan kepala desa. Oleh karena itu, setiap orang yang memenuhi persyaratan berhak memilih dan dipilih. Sedangkan jabatan lain seperti sekretaris desa/carik, bendahara/danarta dankasi/kaur bukan bagian dari jabatan politik. Hal ini karena perangkat desa dipilih melalui seleksi, bukan dipilih langsung oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa kepala desa (di Yogyakarta di sebut lurah) memiliki empat tugas utama yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dalam menjalankan empat tugas tersebut, kepala desa juga mempunyai kewenangan. Apabila kita memahami Undang-Undang Desa pasal 26 ayat (2), dijelaskan lengkap mengenai wewenang seorang kepala desa. Secara singkat, wewenang kepala desa adalah mengatur dan mengurus wilayah desanya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat desa bisa sejahtera, sehat lahir batin, ekonomi tercukupi dan berintegritas melalui pendidikan yang baik.

Walaupun hal tersebut terdengar sederhana, akan tetapi sulit untuk direalisasikan didalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.

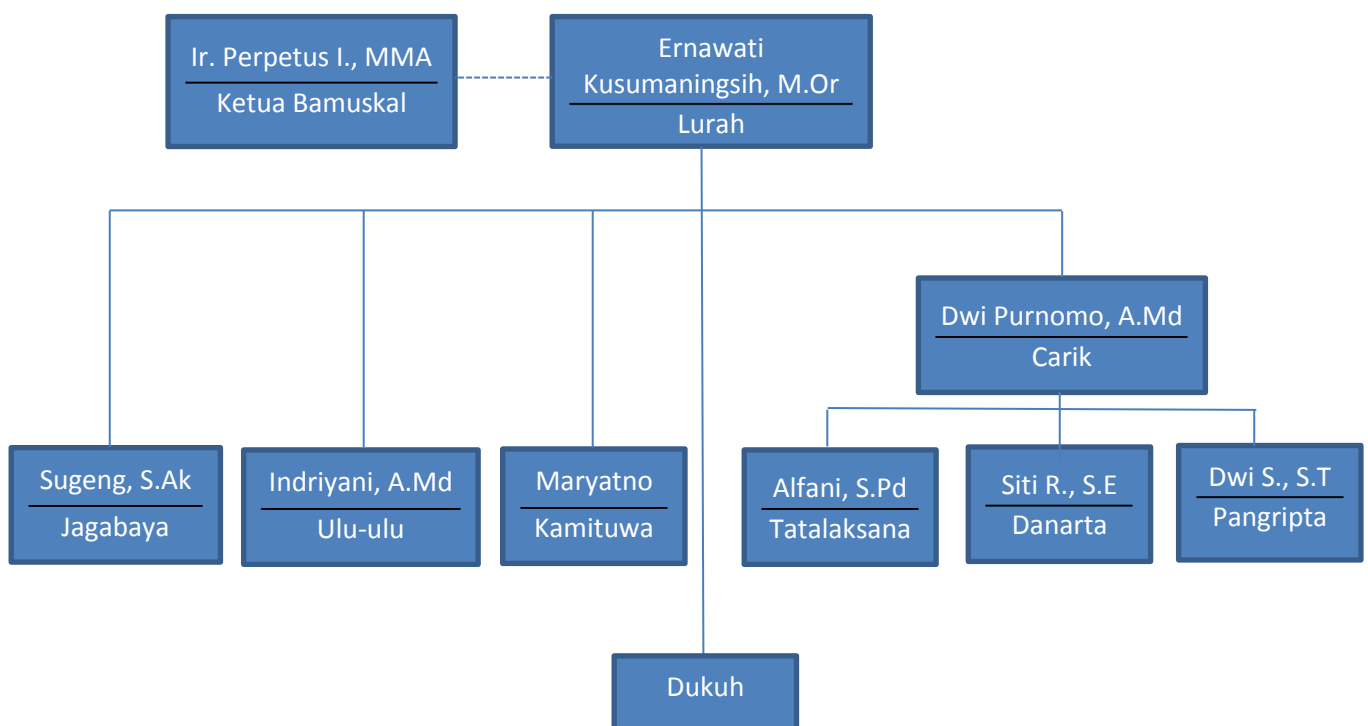
Kepala desa atau lurah di Kalurahan Tirenggo bernama Ernawati Kusumaningsih, M.Or. yang baru dilantik untuk periode 2022-2028 pada hari Sabtu, 5 Oktober 2022 oleh Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Lurah Tirenggo, Ernawati Kusumaningsih, M.Or dibantu oleh carik bernama Dwi Purnomo, A.Md. Ernawati juga dibantu oleh jagabaya sebagai kasi keamanan bernama Sugeng, S.Ak. ulu-ulu bernama Indriyani, A.Md. kamituwa yang bekerja dibidang sosial masyarakat bernama Maryatno, danarta atau bagian keuangan bernama Siti R., S.E. tatalaksana bernama Alfani, S.Pd dan pangripta bernama Dwi S., S.T. Jadi jika dihitung, ada 8 (delapan) perangkat kalurahan yang membantu terselenggaranya program-program Kalurahan Tirenggo Kabupaten Bantul.

Selain perangkat kalurahan di atas, Ernawati Kusumaningsih, M.Or selaku Lurah Tirenggo dalam hal mengatur dan mengurus masyarakat juga dibantu oleh kepala padukuhan (dukuh) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bersentuhan langsung yang dimaksud bukan berarti lurah beserta perangkat kalurahan memiliki penghalang bertemu dengan masyarakat. Akan tetapi dukuh inilah yang dalam setiap waktu lebih sering berada di lingkungan masyarakat bukan di kantor kalurahan atau balai kalurahan. Oleh karena itu, jika ada keluhan dari masyarakat dukuh bisa segera menyampaikan kepada lurah sehingga lurah dapat mengetahui informasi dengan cepat untuk

mengambil kebijakan. Jika dilihat dari struktur pemerintah kalurahan yang ada, dukuh berkoordinasi langsung dengan lurah. Supaya mudah dipahami, peneliti membuat bagan struktur pemerintah dibawah ini :

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Trirenggo

Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul

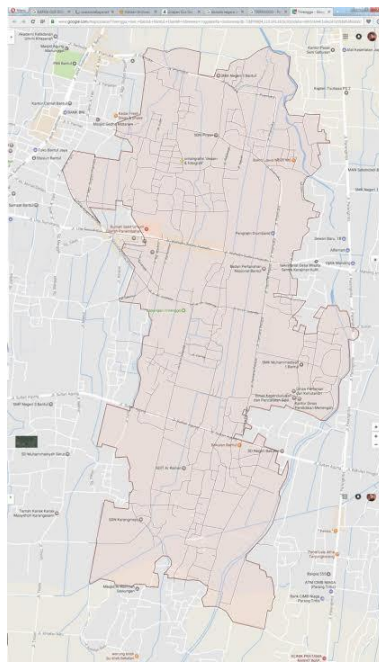


Keterangan : Garis Komando —————

Garis Koordinasi - - - - -

E. Kondisi Geografis Kalurahan Trirenggo

Kalurahan Trirenggo berada di tengah-tengah Kabupaten Bantul, bahkan rumah dinas Bupati Kabupaten Bantul masuk dalam bagian dari Kalurahan Trirenggo. Jika dilihat secara geografis luas Kalurahan Trirenggo memiliki wilayah dengan luas 6.100,00 Ha, yang bertipologi persawahan, kerajinan, kebudayaan, kerajinan dan usaha kecil.



Gambar 2. 1Peta Kalurahan Trirenggo

Perihal mengenai batas wilayah, Kalurahan Trirenggo berada diantara beberapa wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Pendowoharjo Sewon, sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Sumbermulyo Bambanglipuro, sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Sabdodadi Bantul dan sebelah barat berbatasan Kalurahan Bantul. Posisi Kalurahan Trirenggo jika menuju pemerintah kapanewon, kapupaten dan provinsi

memiliki orbitasi dan jarak tempuh sebagai berikut :Jarak dari pemerintah kapanewon 1,80 Km, Jarak dari pemerintah kabupaten 1,80Km, Jarak dari pemerintah provinsi 13 Km. Letak Kalurahan Tlirenggo yang strategis, dimungkinkan dalam pemilihan kepala desa terdapat campur tangan dari orang-orang *eksternal* yang memiliki kepentingan. Orang eksternal yang dimaksud seperti daerah lain yang sudah-sudah, salah satunya bandar judi. Seorang bandar biasanya berasal dari luar daerah pemilihan, akan tetapi ia rela memberikan dukungan materi ataupun non materi kepada calon yang bertarung bahkan terkadang sang calon tidak mengetahui. Bandar judi bisa memainkan politik uang atau *local strongman* tanpa diketahui kandidat kepala desa, tujuannya untuk memenangkan perjudian yang angka nya tentu diatas modal yang dikeluarkan. Hal semacam ini perlu diantisipasi supaya tidak merusak sportifitas dalam pertarungan pemilihan kepala desa, terutama di Tlirenggo yang namanya sedikit lebih eksis daripada kalurahan lain. Walaupun peneliti tidak menemukan bukti peran bandar dalam pilkades 2022 di Kalurahan tltrenggo, akan tetapi hal semacam itu perlu diwaspadai dan diantisipasi.

Secara administratif, pada tahun 2023 Kalurahan Tlirenggo memiliki cakupan pedukuhan sebanyak 17 pedukuhan yaitu :Gempolan, Klembon, Sragan, Priyan, Pasutan, Bogoran, Pepe, Nogosari, Gandekan, Manding, Gedongan, Kweden, Karangmojo, Sumber Batikan, Bakulan, Cepoko dan Pedukuhan Bantul Timur.

F. Komposisi Penduduk Kalurahan

Demografi merupakan sebuah fisual yang menunjukkan kondisi kependudukan yang ada di sebuah wilayah tertentu, saat ini yang dibahas adalah Kalurahan Trirenggo. Guna menentukan perencanaan dan mengkaji fenomena permasalahan maka dibutuhkan fisualisasi demografi. Kemudian fisualisasi demografi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan demi mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Jumlah penduduk menjadi salah satu aspek yang menjadi acuan dalam proses perencanaan. Total keseluruhan penduduk Trirenggo ada 18.721 jiwa terbagi dalam 6.648 KK.

1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Berikut merupakan tabel jumlah penduduk di Kalurahan Trirenggo berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. 2 Jumlah penduduk Kalurahan Trirenggo berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	9.381 Jiwa
2.	Perempuan	9.340 Jiwa
Total		18.721 Jiwa

Sumber : dukan.jogjaprov.go.id Tahun 2021 Semester II

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa penduduk Kalurahan Trirenggo pada tahun 2022 jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui lebih banyak laki-laki daripada perempuan walaupun secara jumlah masing-masing tidak terpaut jauh yaitu 9.381 jiwa laki-laki dan 9.340 jiwa perempuan (selisih 41 jiwa). Dengan realita jumlah laki-laki

lebih dominan dibanding perempuan, maka munculnya dua kandidat laki dalam pilkades Trirenggo, yakni : (1) Yuli Budi Sasangka, S.T., (2) B. Ayom Yuswandono, S.H.

2. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Tabel 2.3 Jumlah penduduk Kalurahan Trirenggo berdasarkan usia

No.	Kelompok Umur	Jumlah
1.	Usia 0-14 tahun	3.938 Jiwa
2.	Usia 15-64 tahun	13.064 Jiwa
3.	Usia 65 tahun keatas	1.719 Jiwa
Total		18.721 Jiwa

Sumber : dukan.jogjaprov.go.id Tahun 2021 Semester II

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk di Kalurahan Trirenggo. Jika dilihat menurut kelompok usia dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di dominasi oleh masyarakat yang berusia 15-64 tahun yaitu sebanyak 13.064 Jiwa. Diurutan kedua ditempati oleh masyarakat dengan usia 0-15 tahun dengan jumlah 3.938 jiwa. Terakhir sebanyak 1.719 jiwa merupakan masyarakat dengan usia lanjut atau 65 tahun keatas. Berdasarkan informasi ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Kalurahan Trirenggo rata-rata berada pada kategori usia produktif. Hal ini mengindikasi bahwa Kalurahan Trirenggo mempunyai sumberdaya manusia yang mencukupi untuk membangun dan memandirikan desa.

3. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 2. 4Jumlah penduduk Kalurahan Trirenggo berdasarkan pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Mengurus rumah tangga	1.427 Orang
2.	Mahasiswa	2.401 Orang
3.	Pensiunan	385 Orang
4.	Belum bekerja	433 Orang
5.	ASN	648 Orang
6.	TNI	63 Orang
7.	Polri	123 Orang
8.	Buruh/Tukang	3.296 Orang
9.	Peternak/Pertanian	918 Orang
10.	Karyawan BUMN/BUMD	55 Orang
11.	Karyawan Swasta	2.465 Orang
12.	Wiraswasta	2.261 Orang
13.	Tenaga Medis	66 Orang
14.	Pekerjaan Lainnya	242 Orang
15.	Belum bekerja	3.938 Orang
Total		18.721 Orang

Sumber : dukan.jogjaprov.go.id Tahun 2021 Semester II

Jika melihat tabel, maka dapat diketahui bahwa mayoritas warga Kalurahan Trirenggo belum bekerja yaitu sebanyak 3.938 Orang. Belum bekerja disini maksud nya masih menempuh jenjang pendidikan atau baru saja menyelesaikan pendidikan sehingga baru mulai mencari pekerjaan. Hal ini memiliki resiko lebih besar terjadi politik uang dalam pilkades. Sebab masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah rentan terhadap rayuan dan pemberian uang untuk memberikan suaranya kepada salah satu kandidat. Di urutan kedua, warga Trirenggo banyak yang bekerja sebagai buruh atau tukang ahli khusus yaitu mencapai 3.296 orang. Buruh menempati urutan kedua karena di dukung oleh wilayah Trirenggo yang

termasuk kedalam Ibukota Kabupaten Bantul dan dilewati jalan-jalan utama sehingga banyak pembangunan yang berlangsung. Urutan pekerjaan yang banyak dilakukan oleh warga yang ketiga adalah karyawan swasta yaitu 2.465 orang. Kemudian warga Tlirenggo berprofesi sebagai, petani, wiraswasta, mahasiswa dan berbagai pekerjaan lainnya.

4. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2. 5 Jumlah penduduk Kalurahan Tlirenggo berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	3.625 Orang
2.	Belum Tamat SD/MI	1.380 Orang
3.	Tamat SD/MI	3.040 Orang
4.	SMP/MTs	2.620 Orang
5.	SLTA	5.819 Orang
6.	D-I atau D-II	173 Orang
7.	D-III atau S.Mud	491 Orang
8.	Strata I	1.443 Orang
9.	Strata II	123 Orang
10.	Strata III	7 Orang
Total		18.721 Orang

Sumber : dukan.jogjaprov.go.id Tahun 2021 Semester II

Masyarakat Tlirenggo secara pendidikan termasuk kedalam kategori baik. Kebanyakan masyarakat yaitu mencapai jumlah 5.819 orang merupakan lulusan SLTA . Kemudian lulusan SD/Sederajat 3.040 orang yang kemungkinan berisi orang-orang yang sudah berumur lanjut. 2.620 Orang tamat SLTP, tingkat pendidikan sarjana terdapat 1.433, tingkat pendidikan D1-D3 ada 664 orang, pasca sarjana 123 orang dan Strata III terdapat 7 Orang.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Kalurahan Trirenggo jika dilihat dari segi pendidikan sudah mumpuni. Para warga yang berpendidikan tinggi setidaknya bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada warga yang pendidikannya berada dibawahnya demi kesejahteraan Trirenggo. Namun, tercatat angka warga lulusan sekolah dasar atau yang tidak sekolah lumayan tinggi. Di khawatirkan mereka tidak terlalu memahami sebab-akibat politik uang. Apabila oknum calon menggunakan strategi politik uang kepada kelompok lulusan SD, maka diprediksi peluang kemenangan semakin terbuka lebar.

G. Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Kalurahan Trirenggo

1. Kondisi Sosial Masyarakat Trirenggo

Kehidupan sosial masyarakat di Kalurahan Trirenggo Kabupaten Bantul berlandaskan keagamaan yang berbudaya. Hubungan kekeluargaan antar individu masyarakat sangat erat sehingga unsur gotong-royong tercipta dengan baik. Jika dilihat dari segi politik-demokrasi, dalam menentukan pemimpin warga masyarakat memiliki kebebasan melalui pilkades. Pilkades ini jika dijalani dengan benar dan masyarakat aktif berpartisipasi maka akan menimbulkan warna-warni kehidupan sosial yang baik. Warga akan berkumpul mejadi satu bagian berdasarkan pandangan dan visi yang sama. Selain itu, pilkades menjadi ajang adu gagasan antar kubu untuk lebih memajukan Kalurahan Trirenggo. Adanya perbedaan pilihan masyarakat bisa dimanfaatkan sebagai kontrol. Artinya warga yang pro dengan pemerintah desa dijadikan pendukung dalam setiap program dan warga yang kontra bisa digali kritik dan saran sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

Namun harapan untuk bergotong-royong dalam dunia politik demokrasi tersebut tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang perpecahan di lingkungan masyarakat terjadi pasca pilkades. Masyarakat yang saat proses pemilihan tidak mendukung pemerintah desa yang disahkan, tidak memiliki rasa handarbeni. Banyak masyarakat yang kemudian acuh dan memiliki pandangan “itu pemerintahmu, bukan pemerintahku” kemudian tidak peduli dengan setiap kebijakan yang hadir. Resiko sedemikian rupa dapat diminimalisir dan tergantung bagaimana nanti kebijakan calon lurah yang terpilih.

2. Kondisi Budaya Masyarakat Kalurahan Tlirenggo

Budaya yang ada di Kalurahan Tlirenggo berkaitan erat dengan sejarah yang dimiliki. Nama “Tlirenggo” saja sudah mengandung budaya, yaitu bahasa daerah lokal yang artinya penggabungan tiga wilayah. Masyarakat Tlirenggo sangat menjunjung tinggi dan berkeinginan kuat untuk selalu melestarikan kesenian, budaya dan tatakrama yang dimiliki. Ada suatu prinsip positif yang di pegang teguh yaitu “*urip iku urup*” memiliki makna bahwa hidup itu nyala. Manusia diberikan kehidupan hendaknya memberi manfaat bagi orang lain disekitar. Dari prinsip tersebut masyarakat setiap dusun di Kalurahan Tlirenggo selalu berlomba-lomba menampilkan kegiatan-kegiatan yang membawa dampak baik bagi orang lain ataupun tempat sekitar.

Warga masyarakat Kalurahan Tlirenggo sangat menghargai tamu yang datang, ada tradisi namanya sinoman atau laden. Sinoman ini merupakan tatacara menghidangkan minuman dan makanan kepada tamu. Mungkin orang yang tidak paham akan menyepelkan hal ini, tetapi ini budaya masyarakat Tlirenggo yang

masih benar-benar dijaga. Dalam memberikan sajian kepada tamu, posisi membawa baki harus diatas alis atau mata agar hidangan tidak terkena karbondioksida yang keluar dari hidung si pembawa. Kemudian dalam memberikan gelas, tangan tidak boleh memegang atas gelas, yang dipegang harus samping agar mulut gelas tidak terkena tangan pramuladi. Posisi sendok di dalam piring pun harus diperhatikan, ketika memberikan makan sendok harus disebelah kanan penerima. Sedetail itu warga Kalurahan Trirenggo menghargai tamu yang datang. Hal semacam ini turun-temurun diajarkan sehingga menjadi sebuah budaya yang berkelanjutan. Rasa memberi penghormatan kepada tamu ini menjadi strategi yang bisa dimanfaatkan oleh calon lurah dalam pilkades serentak 2022. Kandidat yang sering mendatangi rumah-rumah warga, pasti akan mendapatkan dukungan cuma-cuma tanpa mengeluarkan banyak biaya untuk berkampanye.

Upacara-upacara yang bersifat adat juga masih terus di uri-uri oleh warga Kalurahan Trirenggo. Ketika ada orang yang menikah, prosesi yang dilakukan mayoritas kental dengan budaya orang jawa terutama pakem Yogyakarta. Yang paling menonjol adalah bahasa, rata-rata warga asli akan menggunakan bahasa jawa saat upacara pernikahan. Kemudian di ikuti oleh prosesi yang lain seperti siraman, midodareni, balang gantal dan lain sebagainya. sebaliknya, jika ada orang meninggal prosesi yang dilakukan juga berhubungan erat dengan filosofi jawa. Upacara menggunakan bahasa jawa, menyertakan bunga-bunga khusus yang dironce dengan makna tersendiri. Kemudian malam hari nya selama tiga atau tujuh hari dilakukan doa bersama yang disebut tahlilan. Dalam upacara adat yang

dilakukan, pasti mengundang banyak orang dan berkeremun. Calon lurah bisa memanfaatkan hal sedemikian rupa untuk ajang mengenalkan diri kepada masyarakat. Kandidat bisa memberikan sambutan seperti ucapan selamat datang dan terimakasih mewakili tuan rumah, secara tidak langsung warga yang hadir akan bersimpati dan mulai mengenali calon lurah yang maju.

Kesenian juga berkembang pesat di wilayah Trenggeng, ada dua padukuhun yang sudah sangat terkenal di bidang kesenian reog dan jathilan yaitu Padukuhun Bogoran dan Padukuhun Manding. Kedua padukuhun tersebut menjadi icon ketika ada kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya. Calon lurah yang bisa nguri-uri kabudayan yang sudah berkembang tentu akan mendapatkan suara dari para seniman. Mayoritas seniman tidak silau dengan pemberian uang ataupun barang ketika pesta demokrasi digelar, mereka sering memilih pemimpin dengan melihat seberapa cinta dan peduli calon pemimpin tersebut dengan budaya yang ada.

H. Profil Calon Lurah Kalurahan Trenggeng Kabupaten Bantul

Pilkades atau Pemilihan Lurah Kalurahan Trenggeng Kabupaten Bantul merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan penjelasan mengenai masyarakat yang dapat memilih secara langsung pemimpinnya tingkat desa. Berikut ini, penulis akan memaparkan profil calon Lurah Trenggeng yang diselenggarakan pada tahun 2022. Profil calon lurah yang dipaparkan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dan sudah diolah, yang bersumber dari informan serta jejak digital. Tujuan penulis mencantumkan profil setiap calon lurah ialah untuk memudahkan menganalisis fenomena yang

ditemukan di lapangan serta menjadi jembatan bagi penulis untuk melanjutkan kajiannya.

Terdapat tiga kandidat yang bertarung dalam kontestasi demokrasi skala lokal ini, yaitu :

1. Ernawati Kusumaningsih, M.Or.

Ernawati Kusumaningsih, M.Or atau sering dipanggil oleh masyarakat dengan sebutan Bu Erna lahir di Bantul, 3 Maret 1987. Ernawati bertempat tinggal di Jalan Parkit No.17B Gempolan Kulon Tlirenggo Bantul. saat ini beliau memiliki tiga orang putri. Ernawati seorang muslim yang taat, ia mengikuti beberapa rutinan pengajian yang ada di Kalurahan Tlirenggo. Ernawati di kenal dekat dengan dua organisasi Islam besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh NU maupun Muhammadiyah sering beliau ikuti. Mengingat bahwa pendiri dua organisasi tersebut yakni KH. Hasyim Ashari dan KH. Ahmad Dahlan memiliki kesamaan guru waktu menimba ilmu di Semarang yaitu KH. Sholeh Darat, sehingga ajaran masing-masing organisasi NU dan Muhammadiyah tidak berbenturan.

Background Ernawati yang merupakan akademisi bagian olahraga dan sebelumnya bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sama sekali tidak memiliki pengalaman di dunia politik. . Selama bekerja di dinas sosial yang kebetulan di tugaskan di wilayah Kapanewon Bantul, sempat mendapatkan larangan dari suami. Ernawati di minta oleh sang suami untuk menjadi ibu rumah tangga saja. waktu demi waktu dilalui oleh Ernawati dengan memberikan pemahaman secara halus kepada suami bahwa niatnya bekerja di dinas sosial bukan karena gaji akan

tetapi ingin membantu masyarakat yang secara kehidupan belum mampu. Selama bekerja di dinas sosial, grafik kinerja Ernawati terus meningkat dan semakin baik. Hal tersebut menjadi perhatian khusus panewu Kapanewon Bantul dimana beliau bertugas. Seiring berjalannya waktu terdapat lowongan seleksi lurah Trirenggo yang merupakan bagian dari Kapanewon Bantul, Ernawati mendapat dukungan dan dorongan dari panewu untuk maju seleksi. Beliau menyampaikan kepada peneliti melalui wawancara langsung.

“Selanjutnya Panewu Bantul memberikan saran yang sedikit paksaan, karena beliau sudah tahu kinerja saya maka mau tidak mau saya diminta untuk mengikuti seleksi. Kebetulan beliau juga tahu kalau saya warga Trirenggo. Dengan berbagai pertimbangan yang matang dan atas doa restu suami serta orang tua akhirnya saya memberanikan diri untuk mengikuti seleksi (wawancara, 23 Februari 2023).”

Menariknya, Ernawati mampu menduduki jabatan politik walaupun hanya sebatas lurah antarwaktu yang proses seleksi dan pemungutan suaranya tidak jauh berbeda dengan pilkades sesungguhnya. Ernawati lolos seleksi bersama dua pesaingnya dengan poin yang lumayan tinggi. Kemudian tahapan berikutnya adalah pemungutan suara yang dilakukan oleh perwakilan warga melalui RT yaitu sebanyak 152 orang. Ernawati berhasil meraih kemenangan dalam tahapan tersebut dengan mendapatkan 112 suara. Pada tahun 2019 merupakan tahun pertama Ernawati Kusumaningsih, M.Or menjabat sebagai lurah antarwaktu di Kalurahan Trirenggo menggantikan Almarhum Munawar. Periode Almarhum Munawar selaku lurah sebelumnya hingga tahun 2022 pertengahan. Otomatis Ernawati menjadi lurah antar waktu selama kurang lebih dua setengah tahun, menghabiskan masa jabatan Almarhum lurah sebelumnya. Selama beliau

bertugas, masyarakat merasakan kehadiran pemerintah yang selama ini dirasa tidak ada.

Berstatus sebagai lurah antar waktu pada tahun 2020 hingga tahun 2022, ternyata Ernawati Kusumaningsih, M.Or berhasil menyentuh hati masyarakat untuk kembali mempercayakan kedudukan lurah kepadanya di tahun selanjutnya. Banyak masyarakat yang memberikan dukungan dan mendorong Ernawati untuk maju dalam pilkades serentak 2022. Masyarakat merasa tidak puas jika Ernawati hanya memimpin Trirenggo selama dua tahun saja. walaupun sebenarnya Ernawati masih ragu akankah maju lagi atau selesai cukup menghabiskan periode Almarhum Munawar. Keraguan tersebut disampaikan ketika wawancara bersama peneliti di rumah beliau.

" Setelah periode jabatan lurah almarhum Pak Munawar selesai, otomatis tugas saya sebagai lurah antar waktu juga telah usai. Niat untuk mencalonkan diri berperang dalam pilkades serentak tahun 2022 belum terlalu terbesit di pikiran saya. Bahkan Ibu saya sempat sakit karena terlalu memikirkan seandainya saya maju lagi. Beliau takut apabila saya memikul beban terlalu berat karena saya seorang perempuan. Akan tetapi karena dukungan masyarakat Trirenggo sangat kuat, perlahan saya meyakinkan diri sendiri dan ibu bahwa saya mampu (Wawancara, 23 Februari 2023)".

Setelah tumbuh keyakinan yang kuat dan merasa mampu untuk kembali memimpin Trirenggo, kemudian Ernawati Kusumaningsih, M.Or mendaftarkan diri sebagai kandidat kontestasi Pilkades di Kalurahan Trirenggo. Adapun visi-misi yang dipaparkan, yaitu :

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Trirenggo yang guyup rukun, maju dan sejahtera melalui penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang partisipatif

2. Misi

- a. Mengembangkan SDM masyarakat Tirenggo yang bertaqwa, sehat, unggul dan berbudaya.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kalurahan yang amanah, transparan, partisipatif dan akuntabel.
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinergi kerja antara perangkat kalurahan, mitra kalurahan dan seluruh unsur masyarakat.
- d. Memperkuat tumbuhnya perekonomian, pendidikan dan kesehatan masyarakat Tirenggo.

Dari visi dan misi yang diangkat, Ernawati memberikan beberapa tawaran program kepada masyarakat Tirenggo yang berjumlah kisaran 18.000 jiwa. Program tersebut diantaranya perbaikan rumah RTLH, Tirenggo pintar, pengadaan internet gratis disetiap padukuhan, kartu sehat Tirenggo, pembentukan KWT, peningkatan kapasitas karang taruna dan lain sebagainya. Program-program yang ditawarkan tersebut dibungkus dengan slogan “Tirenggo Sehat, Tirenggo Kuat, Tirenggo Bisa”.

2. Yuli Budi Sasangka, S.T.

Yuli Budi Sasangka, S.T. atau sering dipanggil oleh masyarakat dengan nama pendek Mas Budi, lahir di Bantul pada tanggal 6 Juli 1985. Yuli Budi bertempat tinggal di dusun yang sama dengan Ernawati yakni Gempolan Kulon Tirenggo Bantul. Profil dan kampanye beliau tidak terlalu moncer dilingkungan masyarakat karena memang tidak memiliki basic di dunia politik. jika dilihat oleh masyarakat umum, Yuli maju menjadi calon lurah hanya sebatas mencari

keberuntungan dan menghindarkan Trirenggo dari calon lurah tunggal dalam Pilkades 2022. Karena sebelumnya sudah tersebar berita dimasyarakat bahwa tidak ada orang yang berani menantang Ernawati di kontestasi demokrasi lokal yang diselenggarakan di Kalurahan Trirenggo.

3. Bernadinus Ayom Yuswandono, S.H.

Di hari-hari akhir pendaftaran calon Lurah Trirenggo, terdapat satu hal yang mengejutkan. Dari yang sebelumnya tidak ada orang yang berani melawan Ernawati di Pilkades, terdapat nama baru yang muncul sebagai penantang yaitu B. Ayom Yuswandono, S.H. Ayom adalah seorang purnawirawan polisi. Ia lahir di Blitar, 23 Mei 1964. Walaupun sebagai pendatang akan tetapi beliau sudah lama tinggal di Trirenggo tepatnya di Dusun Code Sragan Trirenggo Bantul. Pada tahun 2015 beliau menjadi muallaf dan kini aktif sebagai pengurus takmir masjid Al-Aqila di Dusun Code.

Pengalaman beliau menjadi seorang pemimpin sebenarnya sudah lebih dari cukup. Saat menetap di Bantul pada tahun 2005 hingga 2007 Ayom menjabat sebagai Waka Polsek Bantul. Kemudian ia mendapatkan kenaikan pangkat pada tahun 2007 yaitu menjadi Kapolsek Dlingo. Pada tahun 2008 di pindah tugas menjadi Kapolsek Jetis, menduduki jabatan di Jetis selama tiga tahun. Selanjutnya Ayom juga pernah menjadi kapolsek di Kapanewon Pleret pada tahun 2013. Jabatan kapolsek terus ia pegang pada tahun 2018-2019 sebagai PLH di Polsek Srandakan, Polsek Sewon dan Polsek Imogiri. Terakhir sebelum purna tugas pada tahun 2020, Ayom menjadi kapolsek Bantul. Prestasi yang luar biasa dari tahun 2005 hingga 2020 bisa dikatakan dominan menjadi kapolsek. Tentu banyak sekali

pembelajaran yang beliau dapati untuk bekal menghadapi berbagai permasalahan kedepannya. Hal ini membuktikan bahwa Ayom adalah seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan di atas rata-rata.

Selain bergerak dibidang pekerjaannya sebagai polisi, Ayom Yuswandono juga aktif di lingkungan masyarakat. Ayom pernah menjabat sebagai ketua takmir masjid Al-Aqila Code pada tahun 2008 sampai 2011. Pada masa ia menjadi ketua, masjid code memiliki perkembangan pembangunan yang signifikan. Dari jaringan beliau, sedikit banyak membantu proses perbaikan-perbaikan yang dilaksanakan di masjid tersebut. Setelah periode ketua takmir selesai, Ayom mengabdikan dirinya sebagai Wakil Ketua BPD Trirenggo pada tahun 2012 hingga 2018 sekaligus menjadi Ketua LPMD Code, Sragan Trirenggo Bantul hingga saat ini.

Dengan berbagai bekal ilmu dan pengalaman menjadi seorang yang berada digaris depan, Ayom tidak ingin berhenti mengabdikan pada masyarakat ketika sudah purna tugas dari kepolisian. Pada bulan Juli 2022 nama B. Ayom Yuswandono, S.H. tertulis dalam pengumuman bakal calon Lurah Trirenggo yang memenuhi persyaratan administrasi. Sesuatu yang diluar dugaan masyarakat, karena memang dari awal terlihat jelas untuk melawan Ernawati sangat berat. Walaupun kalah start, akan tetapi beliau tidak main-main.

Dengan memanfaatkan sisa waktu yang ada sebelum hari-h pemungutan suara, ia mempromosikan diri dengan sering bersepeda ke seluruh wilayah Trirenggo, sesekali berhenti ketika ada kerumunan masyarakat untuk sekedar menyapa dan bertanya tentang keluhan selama ini. Selain itu, ketika malam hari

beliau selalu hadir di pos-pos ronda setiap padukuhan untuk melakukan pendekatan kepada bapak-bapak. Ia juga membentuk relawan khusus untuk mendapatkan simpati masyarakat. Dalam berkampanye Ayom Yuswandono memiliki slogan “Kerja Keras, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas”.

I. Hasil Rekapitulasi

Melihat jumlah penduduk Kalurahan Tpirenggo dari segi warga berusia produktif yang berjumlah sekitar 14.107 orang, tentu memiliki peluang besar untuk membangun dan memandirikan Kalurahan Tpirenggo. Namun, pengangguran di Kalurahan Tpirenggo cukup banyak, yakni 4.871 jiwa – hal ini rawan terhadap praktek politik uang saat pilkades. Sebab masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan ekonominya rendah sangat mudah menerima bujukan dan pemberian uang untuk salah satu calon lurah. Apabila oknum kandidat melakukan praktek politik uang terhadap kelompok pengangguran tersebut maka diprediksi kemenangan dalam pemilihan semakin dirasakan.

Adapun tahapan pilkades Tpirenggo diselenggarakan melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Pilkades Kalurahan Tpirenggo diikuti oleh 3 calon, yaitu : (1) Ernawati Kusumaningsih, M.Or (2) Yuli Budi Sasangka, S.T. dan (3) B. Ayom Yuswandono, S.H. pengundian nomor urut tersebut dilakukan pada hari Jumat, 2 September 2022 di pendapa Kalurahan Tpirenggo. Dalam acara pengundian nomor urut dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan Lurah, Perwakilan Dinas PMK Kabupaten Bantul, Panewu Anom Kapanewon Bantul, Bamuskal Tpirenggo, Babinsa, Bhabinkamtibnas, dukuh dan

juga seluruh calon Lurah Tirenggo. Kemudian pemilihan Lurah Tirenggo dilaksanakan pada hari Minggu, 25 September 2022.

Calon urut 1. Ernawati Kusumaningsih, M.Or keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara telak yaitu 7.999 suara atau 76%.

Tabel. 2.6 Hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Lurah Tirenggo 2022

No.	Nama	Jumlah Suara
1.	Ernawati Kusumaningsih, M.Or	7.999
2.	Yuli Budi Sasangka, S.T.	475
3.	B. Ayom Yuswandono, S.H	2.024
Jumlah Suara Sah		10.498
Jumlah Suara Tidak Sah		459
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		10.957

Sumber data lapangan Kalurahan Tirenggo

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang *Pertama*, Niat tulus Ernawati untuk mengabdikan dilandasi rasa tawakal dan istiqomah dalam tindakan. Niat, komitmen dan dukungan keluarga serta masyarakat membuat Ernawati mencalonkan diri sebagai lurah dengan tujuan membangun Tlirenggo lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Niat tulus membangun Tlirenggo menjadi kunci dan prinsip Ernawati sehingga dalam setiap proses yang dilalui pasti jujur tanpa cara-cara yang curang. Bagi Ernawati yang mengaku bahwa modal materi pas-pasan akan sangat berat jika menggunakan politik uang dan cara kotor yang lain. Pikiran untuk curang pun tidak terbesit dalam pikirannya. Sementara jika dilihat pesaingnya yang merupakan pensiunan orang nomor satu di salah satu instansi pemerintahan, tentu modal materi berupa uang lebih banyak - diyakini rawan terjadi politik uang. Namun niat dan tekad yang kuat ini dilatarbelakangi oleh dukungan seluruh lapisan masyarakat yang memandang bahwa Ernawati dekat dengan rakyat dan mampu mengangkat kesejahteraan di Tlirenggo.

Dalam hal ini menjadi kesempatan yang tepat bagi Ernawati Kusumaningsih, M.Or. untuk menjadi kandidat calon Lurah Tlirenggo, karena tidak ada pemimpin yang membawa perubahan dan tidak ada pemimpin yang lebih dekat dengan rakyat. Intinya, pemerintah desa sebelumnya dalam kondisi yang tidak maksimal, program-program yang ada hanya sebatas pelayanan jalan sebagaimana mestinya. Dampaknya adalah Tlirenggo sedikit tertinggal dengan

kalurahan lain yang memiliki gebrakan program untuk menyejahterakan masyarakatnya. Seperti Guwasari dan Panggunharja yang mampu berinovasi membuat program ternak maggot. Sehingga selain pelayanan administrasi, pemerintah desa juga mengangkat ekonomi warga melalui program-programnya.

Rasa Tawakal yang dimiliki Ernawati membuat dirinya tenang menghadapi dinamika politik dalam pilkades. Masyarakat juga senang dengan cara Ernawati mempromosikan diri. Tidak terlalu over power namun bisa mengena tepat dihati masyarakat. Beliau tenang dalam menghadapi pilkades karena kalah menang sudah pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ke dua, mendekatkan diri kepada masyarakat dengan modal sosial. Jika hanya sebatas niat saja maka tidak akan terwujud sesuatu yang nyata. Ernawati yang sebelumnya bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan wilayah kerja salah satunya Trirenggo, memiliki keuntungan tersendiri. Warga masyarakat sudah banyak yang mengenal Ernawati sebelum tahapan-tahapan pilkades dimulai. Selain itu, menjabat lurah antar waktu selama dua setengah tahun menjadi daya tawar utama Ernawati dalam Pilkades serentak tahun 2022. Hampir seluruh informan yang diwawancarai peneliti mengatakan, mendukung Ernawati karena beliau sangat dekat dengan rakyat. Ketika ada pertemuan karang taruna, beliau menyempatkan hadir. Sebatas hadir dan mendengarkan saja ternyata bisa merebut hati anak-anak muda. Ketika ada warga yang meninggal dunia, Erna selalu menyempatkan diri untuk takziah dan memberikan sambutan turut bela sungkawa. Hal tersebut kemudian membuat keluarga besar yang meninggal menjadi simpati karena merasa diperhatikan, efeknya keluarga merasa berhutang

budi dan ketika pilkades diselenggarakan warga membayar hutang budi tersebut dengan memberikan dukungan suara. Selain itu dalam acara-acara seperti posyandu, tahlilan, menyambut hari kemerdekaan dan lain sebagainya beliau selalu memberikan support berupa materi ataupun non materi kepada setiap padukuhan-padukuhan di wilayah tirenggo. Kedekatan beliau terhadap masyarakat merupakan ujung tombak kemenangan mutlak dalam pilkades.

Ketiga, menggunakan strategi kampanye yang *elegant* dengan menawarkan visi-misi dan rekam jejak serta dibantu banyaknya relasi tokoh masyarakat. Setelah Ernawati mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk maju kembali dan telah direstui oleh ibu, faktor tokoh masyarakat sangat berpengaruh dalam kemenangan di Pilkades 2022. Tokoh masyarakat yang dekat dengannya diantaranya kaum rois/istri kaum rois karena selalu bertemu saat upacara pemakaman orang meninggal, para kyai/nyai yang sering bertemu saat rutinan pengajian, para dukuh dan Rt saat bertemu dalam kegiatan gotong-royong. Dekatnya Ernawati dengan para tokoh masyarakat membuat warga semakin mantap memberikan dukungan. Bahkan beberapa tokoh masyarakat secara sukarela membantu dalam proses kampanye Ernawati. Bantuan yang datang tentu bukan tanpa sebab. Mereka (tokoh masyarakat) telah memahami visi-misi Ernawati dan mengetahui rekam jejak beliau selama menjadi lurah antar waktu.

Beberapa motivasi masyarakat memberikan dukungan kepada Ernawati sebagai Lurah Tirenggo, Bantul ada 4 alasan, yakni : (1) melibatkan peran pemuda dalam setiap kegiatan ditingkat kalurahan dan memberikan dukungan kepada pemuda tingkat padukuhan, (2) masyarakat mengakui rekam jejak

Ernawati ketika menjadi lurah antar waktu sangat bagus, (3) pengalaman di dinas sosial dianggap sebagai faktor pendukung dalam mensejahterakan masyarakat, (4) keaktifan mendatangi setiap aktivitas masyarakat seperti takziah, kerja bakti, pengajian, dll.

B. Saran

Saran *pertama* dari peneliti ditujukan kepada Ernawati Kusumaningsih, M.Or. Semoga selalu dekat dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Lurah Trirenggo. Masyarakat dianggap ada, dilibatkan dalam setiap program, disapa saat berpapasan dan hadir ditengah aktivitas masyarakat dalam suasana suka maupun duka sudah membuat masyarakat nyaman, bangga dan merasa diayomi. Selain itu, semoga istiqomah dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian. Nilai-nilai keagamaan yang terus dipupuk akan menjadi kontrol ketika godaan-godaan buruk layaknya korupsi dan lainnya datang. Berawal dari proses yang jujur dalam menduduki jabatan Lurah Trirenggo, semoga berakhir sukses sesuai dengan visi-misi dan harapan masyarakat.

Kedua, peneliti memberikan saran kepada masyarakat Kalurahan Trirenggo. Sesuatu yang telah dicapai dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 yang memilih untuk menolak politik uang perlu dipertahankan. Hal ini merupakan tonggak awal dari sebuah perjuangan agar negara melalui desa terhindar dari korupsi, karena politik uang adalah jalan utama terjadinya korupsi. Selain mempertahankan prinsip antipolitik uang dalam pilkades, alangkah lebih baiknya lagi antipolitik uang juga digunakan dalam pemilihan legislatif diberbagai tingkatan ataupun eksekutif.

Ketiga, saran ditujukan kepada kaum muda generasi penerus bangsa. Hasil dari penelitian ini menjadi pemacu semangat bagi kaum muda yang bersih, jujur dan berintegritas untuk menjadi pemimpin. Tidak selamanya politik itu kotor dan berhubungan dengan jual-beli suara. Harta kekayaan tidak menjamin kemenangan dalam pesta demokrasi. Siapapun berhak untuk mencalonkan diri dan menjadi pemenang jika benar-benar mumpuni dan berniat berjuang untuk rakyat. Saat ini rakyat mulai cerdas, sehingga marilah generasi muda dengan semangat yang masih membara untuk turut serta dalam dunia politik. jangan hanya jadi penonton dan diam, mari bersama-sama kita rubah budaya politik kita menuju kearah yang lebih baik lagi.

Terakhir, Saran ditujukan kepada oknum politikus yang bermain curang. politik yang buruk akan berdampak pada jalannya program pemerintahan yang tidak maksimal. Hasil kemenangan dari praktek politik uang, akan membuat oknum memanfaatkan segala cara untuk mengembalikan modal akhirnya rakyat yang dirugikan. Strategi kampanye hitam dan politik identitas akan menjadikan masyarakat terbelah menjadi beberapa kelompok karena melihat fanatisme warga indonesia sangat tinggi. jika masyarakat sudah terbelah, konflik-kriminalitas akan semakin sering terjadi. Akibatnya suasana menjadi gaduh tidak ada rasa nyaman dan tentram. Secara singkat, memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak baik pasti akan menghasilkan dampak yang tidak baik pula. Perlu diingat ada pepatah mengatakan “sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga”. Suatu saat kebobrokan para oknum politikus pasti akan terbongkar dan selalu menjadi ingatan negatif di lingkungan masyarakat bahkan hingga anak turun

oknum pelaku politik kotor tersebut. Sebagai penutup, marilah bersama-sama membangun niat dan tekad untuk benar-benar membangun bangsa tanpa pamrih.

DAFTAR PUSTAKA

Al Yakin, Ahmad., Muh. Muzani Zulmaizar dan M. Awawing. 2020. Persepsi Masyarakat Terhadap Intervensi Politik pada Pilkadaes di Desa Bela

Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. *Journal Peqguruang : Conference Series* 2 (2) :164-168.

Aminah, dan F. G. A. Nasution. 2022. Kepemimpinan Millennial Dan Dampaknya Terhadap Transformasi Sosial Desa. *Jurnal Governabilitas* 3 (1): 35-49.

Astuti, P., Sulistyowati, dan L. Astrika. 2019. Kontestasi Pasangan Suami Istri Dalam Pilkades. *Jurnal Politik Walisongo* 1 (1): 65-74.

Averus, A., dan Dinda Alfina. 2020. Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Moderat* 6 (2) : 585-610.

Basri, Hasan, M,Si. 2020. Pola Praktik Penggunaan Politik Uang dalam Pilkades di Kabupaten Sumenep. 2020. *Jurnal Setia Pancasila* 1 (1) : 51-64.

Erviantono, Tedi. 2017. Budaya Politik, Uang dan Pilkada. *Jurnal Transformative* 3 (2) : 60-68.

Evendi, Farkhan., dan Denny Arinanda. 2020. Strategi Kampanye Politik Pemilihan Kepala Desa dalam Upaya Menggiring Opini Publik. *Jurnal Translitera* 9 (2) : 12-23.

Falah Fajrul, Muhammad., dan Agus Machfud. 2021. Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politics. *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 6 (3) : 127-133.

Fitriani, Lina Ulfa., L. W. Karyadi dan Dwi Setiawan Chaniago. 2019. Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Resiprokal* 1 (1) : 53-61.

Hidayat, Endik., Miskan. 2019. Proses Demokrasi dan Strategi Pemenangan Berbasis Budaya Jawa di Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. *Jurnal Aplikasi Administrasi* 22 (1) :10-25.

Kazali, Revi., Dr. Endang Rocmiatun, N. Oktario. 2020. Pengaruh Money Politics Terhadap Pilihan Masyarakat Pada Pilkades Serentak di Kabupaten Muara Enim 2017. *Ampera : A Research Journal on Politics and Islamic* 1 (2) : 136-144.

- Kurniasih, Dewi,. 2020. Pendidikan Politik Pemilih Muda dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung Tahun 2019. Indonesia Community Service and Empowerment 1 (1) : 16-21.
- Mubarak, H., dan I. Fauzan. 2019. Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya terhadap Pelayanan Publik. Politeia : Jurnal Ilmu Politik 11 (2): 1-18.
- Pathurrahman, S.M. Hairini dan M. Rico. 2020. The Political Strategy of a Migrant Candidate in Pilkades of Batu Meranti Village. Politeia : Jurnal Pemikiran Politik Islam 2 (1): 73-84.
- Pratiwi, Cholillah Suci., F. Bafadhal dan A. Siska Giovani. 2020. Strategi Marketing Politik Kepala Desa Petahana pada Pilkades di Desa Sidomukti Kecamatan Dandang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 4 (4) : 311-319.
- Renaldi, Libertus,. 2021. Dibalik Kekalahan Petahana : Narasi Politik Negosiasi Masyarakat. Governabilitas 2 (1) :79-96.
- Sholeh, A. N., dan R. Firdaus. 2021. Perilaku Pemilih pada Pilkades Tahun 2019 Perspektif Fiqh Siyasah di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Rechtenstudent Journal 2 (2): 132-144.
- Sukowati, Onik,. dan P. Astuti. 2022. Peran Sabet Kepala Desa Terpilih dalam Pilkades Prambatan Kidul pada Pilkades Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019. Journal of Politic and Government studies 11 (2) : 545-560.
- Suyono,. 2021. Pendidikan Politik pada Pilkades Desa Masangan Wetan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Buana Pendidikan 17 (1) : 42-50.
- Suyono. 2019. Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa Wage Kecamatan Taman Tahun 2016. Buana Pendidikan : Jurnal FKIP Unipa Surabaya (28): 165-178.

Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Web

<https://Tirenggo.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara (*Interview Guide*)

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti menetapkan dua obyek yaitu lurah terpilih dan masyarakat Kalurahan Tlirenggo sebagai sumber informasi guna mendapatkan data lebih lanjut. Berikut beberapa daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara peneliti dengan informan :

A. Sejarah dan strategi yang digunakan oleh Ernawati Kusumaningsih, M.Or hingga berhasil menduduki jabatan Lurah Tlirenggo

1. Bagaimana awal mula Ibu bisa tertarik di dunia politik, hingga bisa menjadi Lurah Tlirenggo?
2. Apa saja rintangan yang Ibu hadapi selama proses menduduki jabatan politik tingkat kalurahan?
3. Bagaimana strategi Ibu untuk mendapatkan suara masyarakat yang sangat banyak pada saat Pilkades 2022?


B. Sudut pandang masyarakat terhadap Ernawati, hingga mereka memberikan dukungan kepada Ernawati di Pilkades serentak se-Kabupaten Bantul

1. Apakah Bapak/Ibu/saudara mendukung Bu Erna dalam pilkades tahun lalu?
2. Mengapa Bapak/Ibu/Saudara memberikan dukungan kepada Bu Erna? Kenapa tidak calon yang lain?
3. Bagaimana Bu Erna dalam pandangan Bapak/Ibu/Saudara?

Lampiran 2. Bukti Wawancara bersama Narasumber



Lampiran 3. Surat Tugas

**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

* PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU PERMUTIHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
* PROGRAM STUDI ILMU PERMUTIHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website: www.apmd.ac.id, e-mail: info@apmd.ac.id

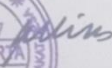
SURAT TUGAS
Nomor : 173/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Ardian Sunarma L.D
Nomor Mahasiswa : 19520023
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.

a. Tempat : Kalurahan Tlirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul
b. Sasaran : Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Tanpa Politik Uang Studi kasus Kalurahan Tlirenggo Kabupaten Bantul Tahun 2022
c. Waktu : 1 April 2023


Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 30 Maret 2023
Ketua

Dr. Sutopo Eko Yunanto
021 70 230 190

PERHATIAN :
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

* PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI: PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
* PROGRAM STUDI: ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 328/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 1 April 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

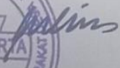
Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :


Nama : Ardian Sunarma L.D
No Mhs : 19520023
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Tanpa Politik Uang Studi kasus Kalurahan Trirenggo Kabupaten Bantul Tahun 2022
Tempat : Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul
Dosen Pembimbing : Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.


Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 Maret 2023

Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIM 170 230 190



Lampiran 5. Surat Penunjukkan Dosen Pembimbingan Skripsi

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)
Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

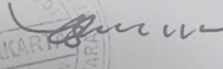
Nomor : 113/PEM/J/X/2022
Hal : Pemunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :
Yth Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ardian Sunarma
No. Mahasiswa : 19520023
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022
Judul Proposal : Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah
Dilampiasikan Melalui Golput Dalam Pemilihan Lurah Serentak
Di Kabupaten Bantul

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022
Ketua Program Studi

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.
